

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAHAN PROVINSI**
Financial Statistics of Province Government

2006-2009

ISSN.

No. Publikasi / Publication Number :

Katalog BPS / BPS Catalogue :

Ukuran Buku / Book Size :

Jumlah Halaman / Number of Pages : halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Subdirectorate of Financial Statistics

Gambar Kulit / Cover design :

Subdirektorat Publikasi Statistik

Subdirectorate Statistical Publication and Compilation

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS – Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAHAN PROVINSI 2006-2009

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Adi Lumaksono, MA

Editor : Wikaningsih, SE
Agus Nuwibowo, S.Si, MM

Penulis : Hasan As'ari, S.Si, ME

Pengolah Data : Desy Apresziyanti, SST
Hasan As'ari, S.Si, ME

<http://www.kips-9.com/id>

DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
PAGE	
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i>	vii
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i>	xix

TABEL

TABLE

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2006-2009</i>	3
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan / <i>Actual Receipts of Provincial Government Throughout Indonesia by Receipt Items 2006-2009</i>	9
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia 2006-2009</i>	45
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia 2006-2009</i>	57

DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u> TABLE	<u>HALAMAN</u> PAGE
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran / <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2006-2009</i>	61
5A. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Indirect Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2006-2009</i>	97
5B. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2006-2009</i>	106
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2006-2009</i>	110

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi secara umum menyajikan data tentang Penerimaan dan Pengeluaran seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia selama empat periode tahun anggaran.

Beberapa indikator / informasi penting yang dapat diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi ini, antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan untuk masing-masing daerah, untuk mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi dapat digunakan sebagai indikator atau informasi tentang potensi dan kemampuan dari masing-masing provinsi dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi diperoleh dari seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia, berarti mencakup 33 provinsi. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Kantor Gubernur (Pemerintah Provinsi) masing-masing provinsi.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi

Adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Yaitu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

Adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah

dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya, dimana tujuan belanja tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik

Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Pegawai Langsung

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan Daerah

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah ;
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
 - b. Transfer dari Dana Cadangan
 - c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
 - d. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ;
 - a. Transfer ke Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal
 - c. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
 - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan Dana Cadangan

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

<http://www.bps.go.id>

II. URAIAN RINGKAS

II.1. Keuangan Pemerintah Provinsi

Pembangunan yang dilakukan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. APBD Provinsi harus mampu merangsang dan mendukung program pembangunan di tingkat kabupaten/kota di bawahnya.

Untuk membiayai pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan kemampuan keuangannya tersebut haruslah diupayakan dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah. Dengan demikian, pengelolaan APBD Provinsi harus selalu disempurnakan agar dapat dihimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

Sejak tahun 2002, kebijakan dalam penyusunan keuangan daerah didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu alokasi anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2006 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga terjadi perubahan format laporan keuangan pemerintah daerah terutama pada sisi pengeluaran. Sistem pelaporan pengeluaran daerah dibagi dalam dua kelompok pengeluaran yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Disebut belanja tidak langsung karena penganggaran belanja tersebut tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan sedangkan belanja langsung adalah penganggaran belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

II.2. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah berasal dari berbagai macam sumber dan secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2006-2008 mengalami peningkatan, dengan total pendapatan dari 69.377 miliar rupiah pada tahun 2006, menjadi 77.935 miliar rupiah pada tahun 2007 dan 96.698 miliar rupiah pada tahun 2008. Peningkatan ini selain disebabkan oleh naiknya penerimaan yang berasal dari dana perimbangan, juga karena adanya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2006. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi ekonomi daerah berdampak pula terhadap perkembangan basis penerimaan daerah yang ada. Pada tahun 2007 pendapatan daerah secara umum meningkat sebesar 12,34 persen begitu pula pada tahun 2008 terjadi peningkatan pendapatan sebesar 24,08 persen. Namun pada tahun 2009 secara umum pemerintah daerah tidak terlalu optimis, dan mengurangi target pendapatan sebesar 0,51 persen. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi turunnya PAD pada tahun 2009 sebesar 4,38 persen. Oleh karena itu pemerintah daerah hanya menganggarkan pendapatan pada tahun 2009 sebesar 96.206 miliar rupiah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, ditempuh berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan karena daerah tidak dapat terus menerus mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber pendapatannya.

**Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan
2006 – 2009 (miliar rupiah)**

No.	Jenis Penerimaan	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	30 557	35 107	44 487	42 539
	a. Pajak Daerah	25 719	29 464	38 043	35 929
	b. Retribusi Daerah	1 602	1 852	1 894	1 498
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	853	1 101	1 301	1 502
	d. Lain-lain PAD yang Sah	2 383	2 690	3 249	3 610
2.	Dana Perimbangan	33 654	36 514	42 993	43 707
	a. Bagi Hasil Pajak	10 281	12 722	14 825	15 727
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 782	6 538	9 511	7 977
	c. Dana Alokasi Umum	14 571	16 479	17 951	18 701
	d. Dana Alokasi Khusus	20	775	706	1 302
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5 166	6 314	9 218	9 960
JUMLAH/TOTAL		69 377	77 935	96 698	96 206

*) Data APBD

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. PAD seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, berarti daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Selama periode tahun 2006-2008, perkembangan PAD terus mengalami kenaikan, dari 30.557 miliar rupiah pada tahun 2006 menjadi sebesar 35.107 miliar rupiah pada tahun 2007 dan 44.487 miliar rupiah pada tahun 2008. Peningkatan pendapatan daerah dari PAD yang cukup besar ini didukung oleh kenaikan penerimaan pajak daerah. Peran kedua terbesar setelah pajak daerah yaitu dari lain-lain PAD yang sah, kemudian retribusi daerah, dan yang paling kecil perannya yaitu penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2009, PAD diperkirakan turun menjadi 42.539 miliar rupiah.

**Tabel B. Sebaran Provinsi Menurut Kategori Tingkat Kemandirian
Seluruh Indonesia 2006 – 2009
(miliar rupiah)**

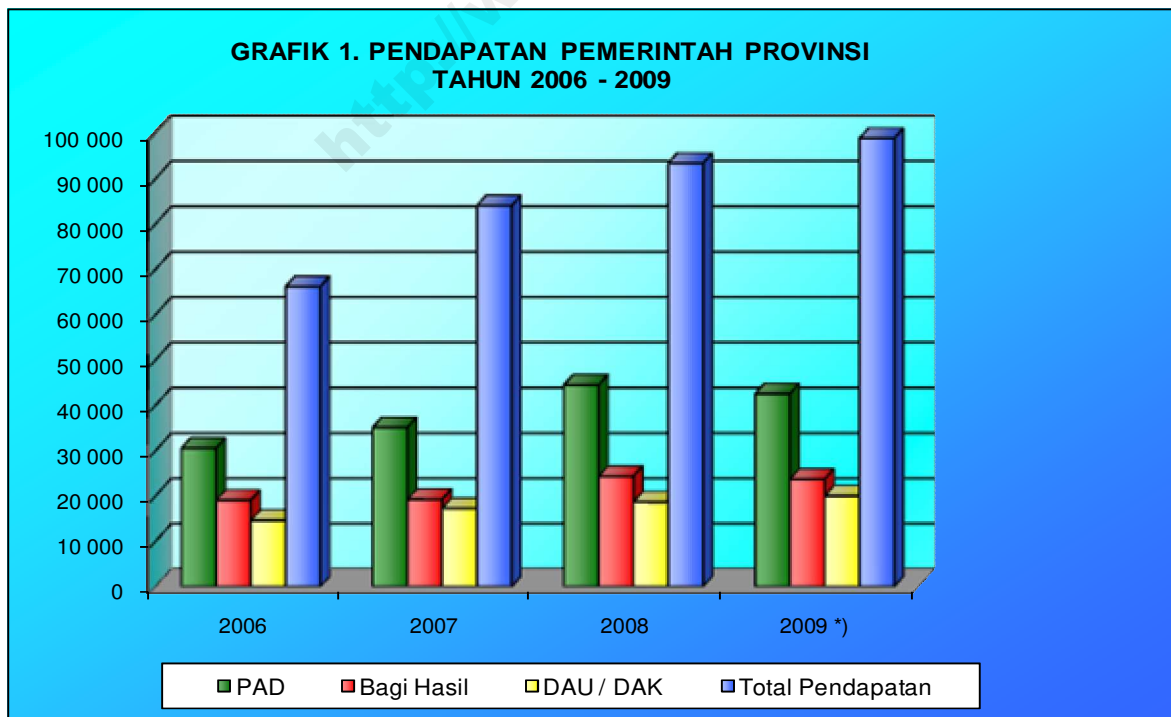
Tahun	Kategori Kemandirian				Jumlah
	Rendah Sekali (0-25)	Rendah (25-50)	Sedang (50-75)	Tinggi (>75)	
2006	13	12	8	0	33
2007	10	15	8	0	33
2008	7	15	11	0	33
2009 *)	9	15	9	0	33

*) APBD

Melihat besaran kontribusi PAD yang masih pada kisaran 25 sampai dengan 50 persen, maka secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia masih dikategorikan rendah. Dari tahun 2006 sampai dengan 2008 tingkat kemandirian keuangan provinsi semakin meningkat. Jika pada tahun 2006 kategori kemandirian

rendah sekali sebanyak 13 provinsi, maka pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing turun menjadi 10 dan 7 provinsi. Hal ini mengindikasikan semakin sedikitnya jumlah provinsi yang peran PAD nya sangat kecil. Tingkat kemandirian yang lebih baik adalah kategori rendah yang dimiliki 12 provinsi pada tahun 2006, sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 menjadi 15 provinsi. Perkembangan yang semakin positif terjadi pada tahun 2008 dimana rasio PAD provinsi yang berada pada range 50-75 persen meningkat dari 8 menjadi 11 provinsi.

Selain dari PAD, sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah tetapi dikelola oleh pemerintah pusat adalah beberapa komponen pajak dan beberapa sumber daya alam, yang sebagian pendapatannya dikembalikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, begitu juga bagi hasil sumber daya alamnya. Pendapatan keduanya sebesar 19.063 miliar rupiah pada tahun 2006, 19.260 miliar rupiah pada tahun 2007 dan 24.336 miliar rupiah pada tahun 2008. sedangkan anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam pada tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan hingga menjadi 23.704 miliar rupiah.



Melalui Tabel C dapat dilihat bahwa mulai tahun 2007 persentase pendapatan yang berasal dari PAD relatif berimbang dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Tetapi jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat menandakan ketergantungan pemerintah daerah hanya sekitar 20 persen. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, masing-masing sebesar 44,04 persen dan 45,05 persen pada tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2008, kontribusi PAD naik menjadi 46,01 persen namun pada tahun 2009 pemerintah daerah memperkirakan penurunan kontribusi PAD menjadi sebesar 44,22 persen. Dari sumber penerimaan yang dikategorikan kedalam PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang paling dominan, dari tahun 2006 sampai tahun 2008 besarnya kontribusi adalah 37,07 persen, 37,81 persen dan 39,34 persen.

**Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan
2006 – 2009 (Persen)**

No.	Jenis Penerimaan	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	44.04	45.05	46.01	44.22
	a. Pajak Daerah	37.07	37.81	39.34	37.35
	b. Retribusi Daerah	2.31	2.38	1.96	1.56
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.23	1.41	1.35	1.56
	d. Lain-lain PAD yang Sah	3.43	3.45	3.36	3.75
2.	Dana Perimbangan	48.51	46.85	44.46	45.43
	a. Bagi Hasil Pajak	14.82	16.32	15.33	16.35
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12.66	8.39	9.84	8.29
	c. Dana Alokasi Umum	21.00	21.14	18.56	19.44
	d. Dana Alokasi Khusus	0.03	0.99	0.73	1.35
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.45	8.10	9.53	10.35
JUMLAH/TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00

*) *Data APBD*

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan menurun dengan kontribusi sebesar 48,51 persen, 46,85 persen dan 44,46 persen pada tahun 2006, 2007 dan 2008, sedangkan pada tahun 2009

dianggarkan naik menjadi 45,43 persen. Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Satu bagian yang lain adalah dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

Dana bagi hasil digunakan untuk memperkecil kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*), artinya menutup kesenjangan antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan dana alokasi umum digunakan sebagai *instrument* pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Dari sisi pembelanjaan, dana-dana transfer tersebut tidak dibatasi untuk jenis belanja tertentu saja, namun daerah memiliki otoritas penuh untuk mengalokasikannya.

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang paling kecil kontribusinya terhadap total pendapatan, dimana pada tahun 2006 hanya sebesar 7,45 persen sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 8,10 persen dan 9,53 persen.

II.3. Belanja Daerah

Dana yang diperoleh Pemerintah Provinsi secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah. Namun setelah diterapkannya sistem anggaran berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada data series yang ditampilkan pada tahun 2006 merupakan hasil konversi dari format belanja daerah berdasarkan kinerja kedalam format baru.

Secara umum realisasi belanja daerah pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan dari tahun 2006, yaitu dari 64.786 miliar rupiah pada tahun 2006 menjadi 75.941 miliar rupiah dan 88.610 miliar rupiah pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sejalan

dengan peningkatan pendapatannya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung. Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, secara umum setiap daerah memperoleh surplus. Pada anggaran tahun 2009 belanja daerah sebesar 106.187 miliar rupiah, dan mengalami defisit anggaran. Secara rinci terangkum pada Tabel D.

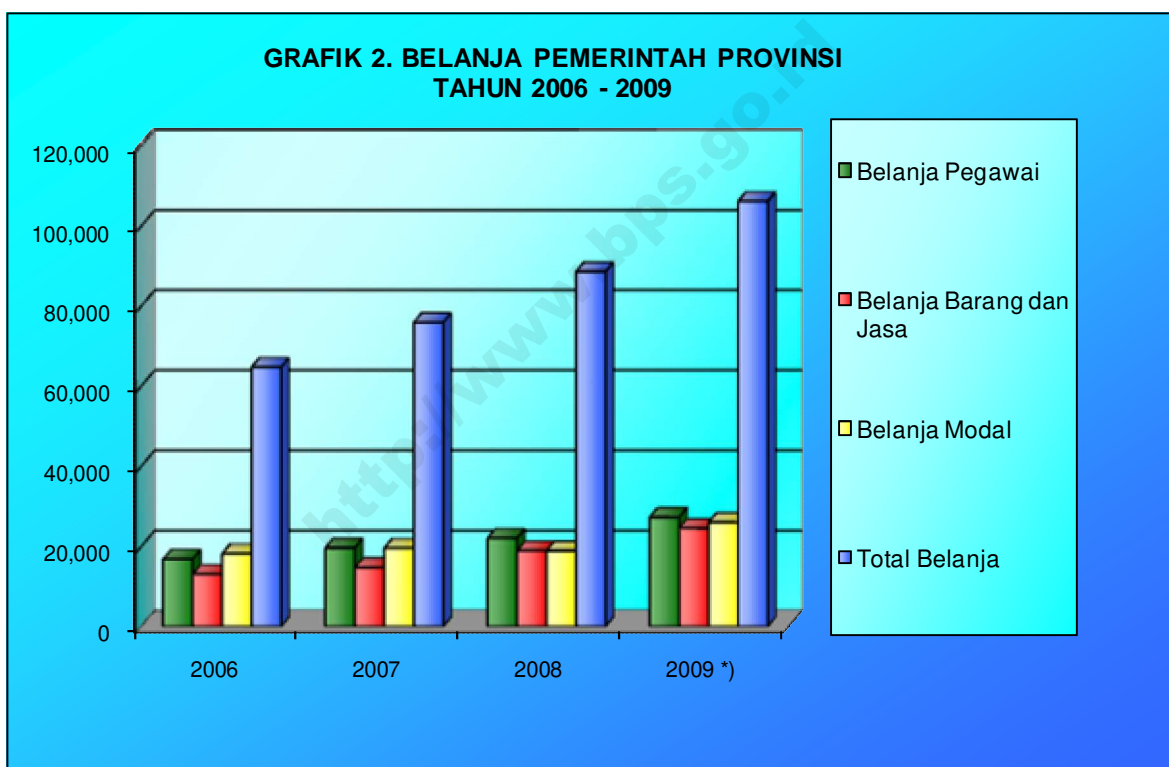
**Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja
2006 - 2009
(miliar rupiah)**

No.	Jenis Pengeluaran	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	30 302	36 215	45 398	49 156
1.	Belanja Pegawai	13 519	14 223	16 666	20 796
2.	Belanja Bunga	41	19	27	21
3.	Belanja Subsidi	4	91	60	129
4.	Belanja Hibah	1 193	640	5 386	2 932
5.	Belanja Bantuan Sosial	2 624	4 460	4 671	4 036
6.	Belanja Bagi Hasil	9 456	9 948	10 596	11 252
7.	Belanja Bantuan Keuangan	2 986	6 588	7 785	9 355
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	479	246	207	635
B.	BELANJA LANGSUNG	34 484	39 726	43 212	57 031
1.	Belanja Pegawai	3 268	5 427	5 372	6 473
2.	Belanja Barang dan Jasa	13 053	14 733	18 943	24 539
3.	Belanja Modal	18 163	19 566	18 897	26 019
JUMLAH/TOTAL		64 786	75 941	88 610	106 187

*) Data APBD

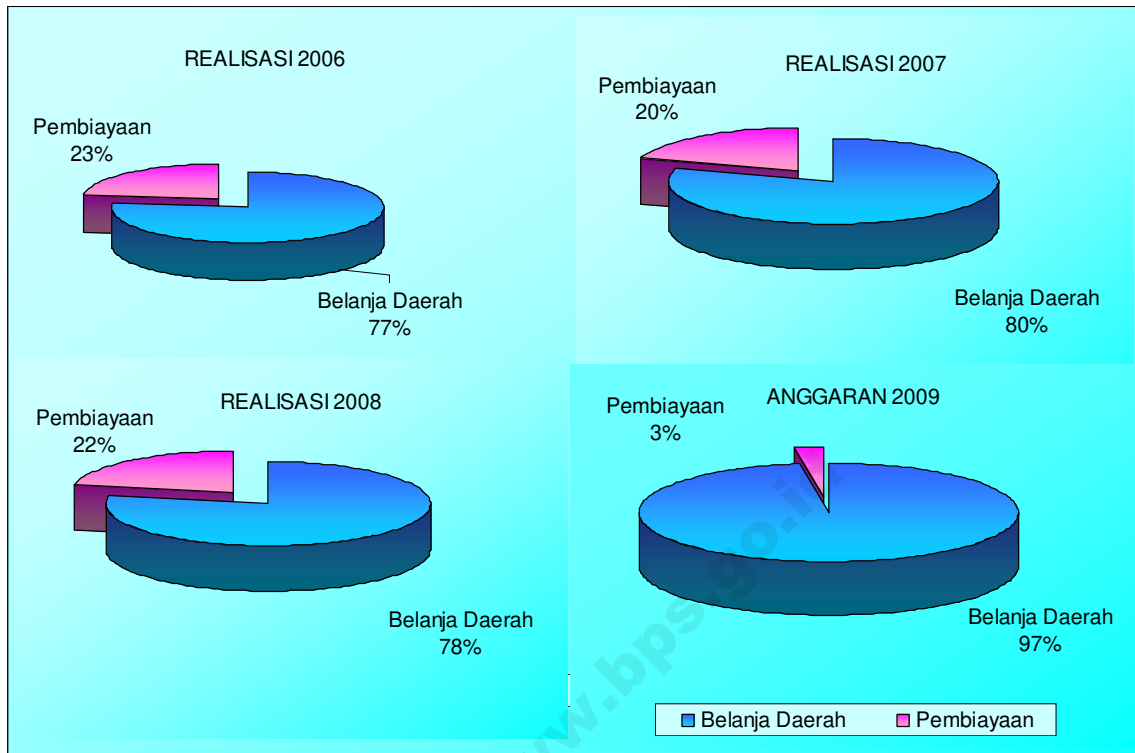
Komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja modal yaitu 18.163 miliar rupiah pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 sebesar 19.566 miliar rupiah atau naik 7,72 persen, lalu pada tahun 2008 turun tipis sebesar 3,42 persen menjadi 18.897 miliar rupiah.

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja pegawai tak langsung yaitu sebesar 13.519 miliar rupiah, 14.223 miliar rupiah dan 16.666 miliar rupiah pada tahun 2006, 2007 dan 2008, artinya pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 5,21 persen dan 17,18 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009 belanja pegawai tak langsung dianggarkan sebesar 20.796 miliar rupiah atau 24,78 persen lebih tinggi dari realisasi 2008. Belanja barang juga memiliki nilai yang cukup besar yaitu 13.053 miliar rupiah pada tahun 2006, 14.733 miliar rupiah pada tahun 2007, dan 18.943 miliar rupiah pada tahun 2008 atau naik sebesar 12,87 persen dan 28,58 persen.



Realisasi belanja daerah dilihat dari sisi penyerapan mencapai 77 persen pada tahun 2006 lalu meningkat pada tahun 2007 menjadi 80 persen, dan turun menjadi 78 persen pada tahun 2008. Target penyerapan pada anggaran 2009 mencapai 97 persen.

**GRAFIK 3. PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2006 - 2009**



Dalam struktur belanja daerah terlihat bahwa belanja langsung memiliki kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan belanja tak langsung. Pada tahun 2006 kontribusi belanja langsung sebesar 53,23 persen dari total belanja daerah, kemudian pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 52,31 persen dan 48,77 persen. Sedangkan belanja tak langsung pada tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar 46,77 persen dan mengalami penurunan menjadi 47,69 persen pada tahun 2007 dan naik lagi menjadi 51,23 persen pada tahun 2008.

Dalam struktur belanja tak langsung pada tahun 2006 dan 2007, peranan belanja pegawai terlihat dominan yaitu masing-masing sebesar 20,87 persen dan 18,73 persen, dan pada tahun 2008 kontribusinya meningkat menjadi 18,81 persen. Komposisi pada belanja langsung didominasi oleh belanja modal dan belanja barang/jasa, yaitu sebesar 28,04 persen dan 20,15 persen pada tahun 2006; 25,76

persen dan 19,40 persen pada tahun 2007, serta pada tahun 2008 sebesar 21,33 persen dan 21,38 persen. Secara rinci terangkum dalam Tabel E.

**Tabel E. Kontribusi Realisasi Belanja
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Menurut Jenis Belanja
2006 – 2009
(Persen)**

No.	Jenis Pengeluaran	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.77	47.69	51.23	46.29
1.	Belanja Pegawai	20.87	18.73	18.81	19.58
2.	Belanja Bunga	0.06	0.03	0.03	0.02
3.	Belanja Subsidi	0.01	0.12	0.07	0.12
4.	Belanja Hibah	1.84	0.84	6.08	2.76
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.05	5.87	5.27	3.80
6.	Belanja Bagi Hasil	14.60	13.10	11.96	10.60
7.	Belanja Bantuan Keuangan	4.61	8.68	8.79	8.81
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0.74	0.32	0.23	0.60
B.	BELANJA LANGSUNG	53.23	52.31	48.77	53.71
1.	Belanja Pegawai	5.04	7.15	6.06	6.10
2.	Belanja Barang dan Jasa	20.15	19.40	21.38	23.11
3.	Belanja Modal	28.04	25.76	21.33	24.50
JUMLAH/TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00

*) Data APBD

II.4. Kesimpulan

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah dari tahun 2006 sampai tahun 2008 terus mengalami kenaikan, seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dalam beberapa aspek serta kinerja ekonomi yang bergerak ke arah yang lebih positif dan lebih baik dari pada tahun anggaran sebelumnya.

Secara umum pertumbuhan penerimaan daerah pada tahun 2006 – 2008 mencapai angka 20 persen, jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi maupun angka inflasi. Kinerja pemerintahan dapat dikatakan belum maksimal jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2006 – 2008 yang hanya mampu menyerap sekitar 80 persen dari penerimaan.

Kontribusi terbesar pada belanja daerah terdapat pada belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pada tahun 2008 mencapai 24,87 persen, 21,38 persen dan 21,33 persen atau dapat di katakan bahwa 67,58 persen belanja daerah digunakan untuk ketiga komponen tersebut diatas.

<http://www.bps.go.id>

TABEL
1.a
TABLE

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
2006
(000 rupiah)

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	4 067 191 813	1 877 160 961	5 944 352 774	2 442 721 686	3 501 631 088	5 944 352 774
2.	Sumatera Utara	2 299 465 405	217 937 578	2 517 402 983	2 184 668 830	332 734 153	2 517 402 983
3.	Sumatera Barat	1 058 664 158	147 708 192	1 206 372 350	960 089 657	246 282 693	1 206 372 350
4.	R i a u	3 579 679 042	831 884 360	4 411 563 402	3 171 096 747	1 240 466 655	4 411 563 402
5.	J a m b i	1 010 116 940	280 698 822	1 290 815 762	963 238 880	327 576 882	1 290 815 762
6.	Sumatera Selatan	1 866 212 730	259 900 775	2 126 113 505	1 741 587 199	384 526 306	2 126 113 505
7.	Bengkulu	556 308 031	75 951 032	632 259 063	504 874 262	127 384 801	632 259 063
8.	Lampung	1 294 948 833	410 233 213	1 705 182 046	1 341 056 665	364 125 381	1 705 182 046
9.	Bangka Belitung	534 173 639	227 005 972	761 179 611	463 381 818	297 797 793	761 179 611
10.	Kepulauan Riau	1 131 634 051	261 061 149	1 392 695 200	912 308 731	480 386 469	1 392 695 200
11.	DKI Jakarta	14 337 530 976	3 107 087 921	17 444 618 897	15 161 577 796	2 283 041 101	17 444 618 897
12.	Jawa Barat	5 047 199 211	1 000 895 099	6 048 094 310	4 907 738 249	1 140 356 061	6 048 094 310
13.	Jawa Tengah	3 818 467 960	814 829 550	4 633 297 510	3 747 644 090	885 653 420	4 633 297 510
14.	D I Yogyakarta	881 144 850	189 400 980	1 070 545 830	850 630 248	219 915 582	1 070 545 830
15.	Jawa Timur	5 103 267 666	1 245 199 284	6 348 466 950	5 126 544 600	1 221 922 350	6 348 466 950
16.	Banten	1 587 901 993	352 917 848	1 940 819 841	1 812 123 879	128 695 962	1 940 819 841
17.	B a l i	1 150 934 290	256 422 410	1 407 356 700	1 215 474 100	191 882 600	1 407 356 700
18.	Nusa Tenggara Barat	740 870 869	75 990 834	816 861 703	731 491 661	85 370 042	816 861 703
19.	Nusa Tenggara Timur	704 101 271	294 705 889	998 807 160	637 291 268	361 515 892	998 807 160
20.	Kalimantan Barat	1 047 098 094	62 788 210	1 109 886 304	952 697 811	157 188 493	1 109 886 304
21.	Kalimantan Tengah	889 459 523	93 808 130	983 267 653	840 513 197	142 754 456	983 267 653
22.	Kalimantan Selatan	1 179 994 168	195 626 451	1 375 620 619	1 130 858 645	244 761 974	1 375 620 619
23.	Kalimantan Timur	4 847 421 022	1 999 681 766	6 847 102 788	3 768 786 321	3 078 316 467	6 847 102 788
24.	Sulawesi Utara	653 592 446	66 024 839	719 617 285	649 758 172	69 859 113	719 617 285
25.	Sulawesi Tengah	682 525 017	47 204 072	729 729 089	652 931 968	76 797 121	729 729 089
26.	Sulawesi Selatan	1 480 115 047	190 188 442	1 670 303 489	1 392 341 273	277 962 216	1 670 303 489
27.	Sulawesi Tenggara	598 368 956	36 325 654	634 694 610	561 198 292	73 496 318	634 694 610
28.	Gorontalo	460 791 544	6 485 870	467 277 414	396 602 358	70 675 056	467 277 414
29.	Sulawesi Barat	325 557 827	22 243 637	347 801 464	273 783 117	74 018 347	347 801 464
30.	M a l u k u	558 231 780	32 908 750	591 140 530	541 215 700	49 924 830	591 140 530
31.	Maluku Utara	449 495 072	0	449 495 072	427 335 313	22 159 759	449 495 072
32.	P a p u a	4 895 058 660	0	4 895 058 660	3 918 020 420	977 038 240	4 895 058 660
33.	Papua Barat	539 190 302	0	539 190 302	404 238 908	134 951 394	539 190 302
JUMLAH/TOTAL		69 376 713 186	14 680 277 690	84 056 990 876	64 785 821 861	19 271 169 015	84 056 990 876

TABEL
TABLE 1.b

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT AND EXPENDITURE THROUGHOUT INDONESIA
2007
(000 rupiah)

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3 012 478 243	3 747 007 039	6 759 485 282	3 342 664 006	3 416 821 276	6 759 485 282
2.	Sumatera Utara	2 685 787 991	289 362 661	2 975 150 652	2 553 275 355	421 875 297	2 975 150 652
3.	Sumatera Barat	1 281 399 813	219 592 372	1 500 992 185	1 241 375 383	259 616 802	1 500 992 185
4.	R i a u	3 413 009 700	1 069 452 884	4 482 462 584	3 726 765 113	755 697 471	4 482 462 584
5.	J a m b i	1 155 350 574	310 525 175	1 465 875 749	1 105 387 889	360 487 860	1 465 875 749
6.	Sumatera Selatan	2 135 815 045	337 301 961	2 473 117 006	2 319 231 676	153 885 330	2 473 117 006
7.	Bengkulu	765 422 617	103 587 915	869 010 532	664 760 147	204 250 385	869 010 532
8.	Lampung	1 374 096 047	350 625 381	1 724 721 428	1 515 260 211	209 461 217	1 724 721 428
9.	Bangka Belitung	609 868 624	290 197 793	900 066 417	593 778 370	306 288 047	900 066 417
10.	Kepulauan Riau	1 017 339 174	447 501 470	1 464 840 644	1 277 577 364	187 263 280	1 464 840 644
11.	DKI Jakarta	16 668 046 974	2 020 596 204	18 688 643 178	16 849 870 673	1 838 772 505	18 688 643 178
12.	Jawa Barat	6 008 240 717	956 424 657	6 964 665 374	5 341 776 466	1 622 888 908	6 964 665 374
13.	Jawa Tengah	4 363 512 594	431 233 897	4 794 746 491	3 899 313 366	895 433 125	4 794 746 491
14.	D I Yogyakarta	1 306 701 213	210 869 773	1 517 570 986	977 994 235	539 576 751	1 517 570 986
15.	Jawa Timur	5 940 048 020	915 169 863	6 855 217 883	5 267 845 344	1 587 372 539	6 855 217 883
16.	Banten	1 908 840 531	157 157 181	2 065 997 712	1 867 228 063	198 769 649	2 065 997 712
17.	B a l i	1 368 004 401	178 282 654	1 546 287 055	1 259 208 593	287 078 462	1 546 287 055
18.	Nusa Tenggara Barat	863 206 508	65 133 785	928 340 293	852 503 744	75 836 549	928 340 293
19.	Nusa Tenggara Timur	875 624 704	348 582 927	1 224 207 631	910 232 541	313 975 090	1 224 207 631
20.	Kalimantan Barat	1 185 930 369	141 165 668	1 327 096 037	1 136 256 282	190 839 755	1 327 096 037
21.	Kalimantan Tengah	1 064 754 305	121 727 557	1 186 481 862	978 628 834	207 853 028	1 186 481 862
22.	Kalimantan Selatan	1 385 078 532	201 618 017	1 586 696 549	1 278 259 562	308 436 987	1 586 696 549
23.	Kalimantan Timur	4 499 534 124	3 083 537 760	7 583 071 884	4 693 239 453	2 889 832 431	7 583 071 884
24.	Sulawesi Utara	807 320 996	35 372 752	842 693 748	774 651 376	68 042 372	842 693 748
25.	Sulawesi Tengah	792 616 920	25 524 876	818 141 796	701 626 237	116 515 559	818 141 796
26.	Sulawesi Selatan	1 809 498 887	266 251 110	2 075 749 997	1 833 767 270	241 982 727	2 075 749 997
27.	Sulawesi Tenggara	709 299 741	62 761 318	772 061 059	759 061 059	13 000 000	772 061 059
28.	Gorontalo	521 582 664	73 948 507	595 531 171	459 239 656	136 291 515	595 531 171
29.	Sulawesi Barat	365 768 221	29 533 700	395 301 921	346 080 316	49 221 605	395 301 921
30.	M a l u k u	911 329 531	43 191 584	954 521 115	636 677 949	317 843 166	954 521 115
31.	Maluku Utara	544 406 748	22 159 758	566 566 506	532 721 544	33 844 962	566 566 506
32.	P a p u a	5 898 149 348	535 610 092	6 433 759 440	5 554 096 428	879 663 012	6 433 759 440
33.	Papua Barat	687 364 004	196 892 987	884 256 991	690 747 978	193 509 013	884 256 991
JUMLAH/TOTAL		77 935 427 880	17 287 901 278	95 223 329 158	75 941 102 483	19 282 226 675	95 223 329 158

TABEL
TABLE 1.c

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT AND EXPENDITURE THROUGHOUT INDONESIA
2008
(000 rupiah)

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	6 911 764 845	3 141 732 122	10 053 496 967	5 715 623 666	4 337 873 301	10 053 496 967
2.	Sumatera Utara	3 225 853 317	394 258 830	3 620 112 147	2 967 350 795	652 761 352	3 620 112 147
3.	Sumatera Barat	1 723 767 565	258 039 339	1 981 806 904	1 637 700 489	344 106 415	1 981 806 904
4.	R i a u	4 164 943 199	466 019 841	4 630 963 040	3 657 889 820	973 073 220	4 630 963 040
5.	J a m b i	1 436 381 400	359 487 858	1 795 869 258	1 404 982 484	390 886 774	1 795 869 258
6.	Sumatera Selatan	2 574 429 820	101 043 442	2 675 473 262	2 386 788 811	288 684 451	2 675 473 262
7.	Bengkulu	1 082 518 266	445 850 386	1 528 368 652	1 249 666 188	278 702 464	1 528 368 652
8.	Lampung	1 723 036 643	180 319 738	1 903 356 381	1 711 015 163	192 341 218	1 903 356 381
9.	Bangka Belitung	840 122 439	254 692 423	1 094 814 862	775 348 992	319 465 870	1 094 814 862
10.	Kepulauan Riau	1 356 574 432	184 315 626	1 540 890 058	1 148 936 845	391 953 213	1 540 890 058
11.	DKI Jakarta	19 221 757 881	1 364 256 321	20 586 014 202	15 956 526 086	4 629 488 116	20 586 014 202
12.	Jawa Barat	7 275 007 134	1 350 314 356	8 625 321 490	6 110 959 797	2 514 361 693	8 625 321 490
13.	Jawa Tengah	5 203 414 609	848 298 788	6 051 713 397	5 162 662 476	889 050 921	6 051 713 397
14.	D I Yogyakarta	1 258 609 946	537 060 364	1 795 670 310	1 453 286 282	342 384 028	1 795 670 310
15.	Jawa Timur	7 075 105 413	1 723 922 045	8 799 027 458	6 203 660 594	2 595 366 864	8 799 027 458
16.	Banten	2 351 380 505	149 104 130	2 500 484 635	2 253 982 712	246 501 923	2 500 484 635
17.	B a l i	1 667 342 648	282 503 094	1 949 845 742	1 464 226 342	485 619 400	1 949 845 742
18.	Nusa Tenggara Barat	1 066 716 532	71 073 304	1 137 789 836	1 042 946 465	94 843 371	1 137 789 836
19.	Nusa Tenggara Timur	946 026 752	310 377 666	1 256 404 418	984 233 461	272 170 957	1 256 404 418
20.	Kalimantan Barat	1 474 197 546	134 331 750	1 608 529 296	1 360 959 910	247 569 386	1 608 529 296
21.	Kalimantan Tengah	1 246 835 944	205 554 131	1 452 390 075	1 276 361 391	176 028 684	1 452 390 075
22.	Kalimantan Selatan	1 875 797 122	269 666 395	2 145 463 517	1 545 693 966	599 769 551	2 145 463 517
23.	Kalimantan Timur	6 127 503 221	2 361 237 901	8 488 741 122	6 356 384 491	2 132 356 631	8 488 741 122
24.	Sulawesi Utara	965 147 321	385 989 059	1 351 136 380	913 982 712	437 153 668	1 351 136 380
25.	Sulawesi Tengah	1 042 484 623	108 000 559	1 150 485 182	954 733 636	195 751 546	1 150 485 182
26.	Sulawesi Selatan	2 133 624 783	208 669 551	2 342 294 334	2 134 520 569	207 773 765	2 342 294 334
27.	Sulawesi Tenggara	957 848 767	61 603 700	1 019 452 467	899 241 856	120 210 611	1 019 452 467
28.	Gorontalo	536 574 283	128 731 650	665 305 933	537 171 736	128 134 197	665 305 933
29.	Sulawesi Barat	510 759 425	70 248 928	581 008 353	520 189 772	60 818 581	581 008 353
30.	M a l u k u	786 335 010	62 415 818	848 750 828	780 644 636	68 106 192	848 750 828
31.	Maluku Utara	676 545 728	26 220 676	702 766 404	645 497 728	57 268 676	702 766 404
32.	P a p u a	5 757 078 135	0	5 757 078 135	5 750 667 126	6 411 009	5 757 078 135
33.	Papua Barat	1 502 766 461	193 508 717	1 696 275 178	1 646 990 743	49 284 435	1 696 275 178
JUMLAH/TOTAL		96 698 251 715	16 638 848 508	113 337 100 223	88 610 827 740	24 726 272 483	113 337 100 223

TABEL
TABLE 1.d

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT AND EXPENDITURE THROUGHOUT INDONESIA
2009 *)
(000 rupiah)

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	6 732 212 000	3 141 732 122	9 873 944 122	9 791 344 122	82 600 000	9 873 944 122
2.	Sumatera Utara	3 248 999 615	399 149 726	3 648 149 341	3 615 975 756	32 173 585	3 648 149 341
3.	Sumatera Barat	1 523 895 516	225 948 895	1 749 844 411	1 707 692 604	42 151 807	1 749 844 411
4.	R i a u	3 663 102 706	499 914 620	4 163 017 326	4 006 116 876	156 900 450	4 163 017 326
5.	J a m b i	1 292 670 701	386 301 605	1 678 972 306	1 670 048 306	8 924 000	1 678 972 306
6.	Sumatera Selatan	2 681 672 319	70 000 000	2 751 672 319	2 751 672 319	0	2 751 672 319
7.	Bengkulu	1 007 090 122	217 257 136	1 224 347 258	857 592 407	366 754 851	1 224 347 258
8.	Lampung	1 697 783 337	192 341 217	1 890 124 554	1 890 124 554	0	1 890 124 554
9.	Bangka Belitung	812 036 492	191 877 206	1 003 913 698	1 001 913 698	2 000 000	1 003 913 698
10.	Kepulauan Riau	1 330 000 000	310 000 000	1 640 000 000	1 636 000 000	4 000 000	1 640 000 000
11.	DKI Jakarta	20 704 533 259	1 746 000 000	22 450 533 259	22 139 467 174	311 066 085	22 450 533 259
12.	Jawa Barat	6 951 984 436	1 310 761 917	8 262 746 353	8 262 578 446	167 907	8 262 746 353
13.	Jawa Tengah	5 340 393 051	694 157 160	6 034 550 211	5 692 612 376	341 937 835	6 034 550 211
14.	D I Yogyakarta	1 221 594 241	206 829 744	1 428 423 985	1 412 048 985	16 375 000	1 428 423 985
15.	Jawa Timur	5 950 571 845	467 075 903	6 417 647 748	6 314 055 748	103 592 000	6 417 647 748
16.	Banten	2 220 917 360	159 198 104	2 380 115 464	2 366 615 464	13 500 000	2 380 115 464
17.	B a l i	1 409 543 102	258 329 975	1 667 873 077	1 643 973 077	23 900 000	1 667 873 077
18.	Nusa Tenggara Barat	1 244 400 756	85 662 695	1 330 063 451	1 263 453 451	66 610 000	1 330 063 451
19.	Nusa Tenggara Timur	954 424 000	122 199 375	1 076 623 375	1 026 623 375	50 000 000	1 076 623 375
20.	Kalimantan Barat	1 478 166 143	70 300 000	1 548 466 143	1 528 166 143	20 300 000	1 548 466 143
21.	Kalimantan Tengah	1 572 965 940	145 977 802	1 718 943 742	1 699 140 542	19 803 200	1 718 943 742
22.	Kalimantan Selatan	1 638 464 720	67 500 000	1 705 964 720	1 628 166 720	77 798 000	1 705 964 720
23.	Kalimantan Timur	5 011 283 225	750 000 000	5 761 283 225	5 429 283 225	332 000 000	5 761 283 225
24.	Sulawesi Utara	1 028 715 617	341 835 932	1 370 551 549	1 120 451 549	250 100 000	1 370 551 549
25.	Sulawesi Tengah	1 064 459 478	58 099 357	1 122 558 835	1 099 675 223	22 883 612	1 122 558 835
26.	Sulawesi Selatan	2 209 465 232	82 264 617	2 291 729 849	2 288 468 449	3 261 400	2 291 729 849
27.	Sulawesi Tenggara	1 264 927 000	158 364 000	1 423 291 000	1 410 991 000	12 300 000	1 423 291 000
28.	Gorontalo	534 504 910	154 134 197	688 639 107	534 504 910	154 134 197	688 639 107
29.	Sulawesi Barat	574 142 329	30 771 857	604 914 186	603 914 186	1 000 000	604 914 186
30.	M a l u k u	916 236 179	21 846 597	938 082 776	931 817 776	6 265 000	938 082 776
31.	Maluku Utara	721 409 409	50 000 000	771 409 409	755 909 409	15 500 000	771 409 409
32.	P a p u a	5 322 085 000	0	5 322 085 000	5 142 085 000	180 000 000	5 322 085 000
33.	Papua Barat	2 881 160 000	108 550 000	2 989 710 000	2 964 505 000	25 205 000	2 989 710 000
JUMLAH/TOTAL		96 205 810 040	12 724 381 759	108 930 191 799	106 186 987 870	2 743 203 929	108 930 191 799

*) Data APBD

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

TABEL
TABLE 2

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI
SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	69 376 713 186	77 935 427 880	96 698 251 715	96 205 810 040
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	30 556 135 053	35 107 948 811	44 486 733 562	42 539 534 813
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	25 719 347 146	29 464 063 064	38 042 637 125	35 928 894 966
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	1 601 546 853	1 852 446 348	1 894 314 643	1 497 915 112
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	852 500 283	1 101 338 485	1 300 646 754	1 502 304 652
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	2 382 740 771	2 690 100 914	3 249 135 040	3 610 420 083
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	33 654 398 517	36 513 742 961	42 992 798 385	43 705 801 798
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	10 280 860 925	12 721 504 646	14 824 628 954	15 727 062 368
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	8 782 163 818	6 538 440 791	9 510 681 776	7 976 659 011
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	14 571 373 774	16 478 797 524	17 951 467 919	18 700 544 419
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	20 000 000	775 000 000	706 019 736	1 301 536 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	5 166 179 616	6 313 736 108	9 218 719 768	9 960 473 429
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	14 680 277 690	17 287 901 278	16 638 848 508	12 724 381 759
JUMLAH/TOTAL		84 056 990 876	95 223 329 158	113 337 100 223	108 930 191 799

*) Data APBD

TABEL
TABLE

2.1

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NANGGROE ACEH DARUSSALAM BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	4 067 191 813	3 012 478 243	6 911 764 845	6 732 212 000
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	476 909 834	587 487 310	716 290 965	795 872 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	309 612 956	362 835 198	464 317 355	476 975 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	6 942 878	8 321 996	12 002 090	13 264 165
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	18 493 041	44 328 326	66 796 142	74 512 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	141 860 959	172 001 790	173 175 378	231 120 835
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 312 771 517	1 804 922 903	2 605 330 983	2 208 058 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	120 084 184	139 140 772	272 366 381	184 902 812
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 731 806 333	1 177 848 131	1 765 016 546	1 465 279 961
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	460 881 000	487 934 000	557 327 156	509 686 227
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	10 620 900	48 189 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 277 510 462	620 068 030	3 590 142 897	3 728 282 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 877 160 961	3 747 007 039	3 141 732 122	3 141 732 122
JUMLAH/TOTAL		5 944 352 774	6 759 485 282	10 053 496 967	9 873 944 122
*) Data APBD					

TABEL
TABLE 2.2

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NORTH SUMATERA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	2 299 465 405	2 685 787 991	3 225 853 317	3 248 999 615
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 502 608 215	1 693 846 305	2 181 311 593	2 104 202 616
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 366 445 063	1 542 508 891	2 002 004 605	1 946 447 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	11 714 728	13 611 810	29 409 174	25 552 581
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	90 291 200	74 138 551	89 673 273	96 820 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	34 157 224	63 587 053	60 224 541	35 383 035
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	782 842 712	951 081 298	1 039 050 126	1 118 068 902
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	240 832 727	291 470 533	306 252 063	316 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 291 985	2 253 765	4 887 241	1 367 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Alocation Funds</i>	539 718 000	657 357 000	727 910 822	754 398 902
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Alocation Funds</i>	0	0	0	46 303 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	14 014 478	40 860 388	5 491 598	26 728 097
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	217 937 578	289 362 661	394 258 830	399 149 726
JUMLAH/TOTAL		2 517 402 983	2 975 150 652	3 620 112 147	3 648 149 341

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.3

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST SUMATERA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 058 664 158	1 281 399 813	1 723 767 565	1 523 895 516
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	494 929 543	571 607 517	790 087 768	723 757 576
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	409 139 881	479 453 172	670 371 641	617 070 002
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	10 785 842	32 386 371	50 673 617	26 667 824
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	25 574 011	29 889 087	36 480 958	37 120 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	49 429 809	29 878 887	32 561 552	42 899 750
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	554 231 885	633 865 693	744 202 076	786 622 940
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	71 452 737	84 268 343	85 861 993	89 206 490
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 750 148	3 265 350	1 981 379	1 294 440
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	477 029 000	546 332 000	631 791 704	648 943 010
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	24 567 000	47 179 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	9 502 730	75 926 603	189 477 721	13 515 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	147 708 192	219 592 372	258 039 339	225 948 895
JUMLAH/TOTAL		1 206 372 350	1 500 992 185	1 981 806 904	1 749 844 411

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.4

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI R I A U MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF R I A U BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	3 579 679 042	3 413 009 700	4 164 943 199	3 663 102 706
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	964 668 290	1 257 064 415	1 477 579 373	1 276 252 706
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	764 546 115	926 592 209	1 274 416 993	1 058 650 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	29 658 738	35 953 276	28 016 663	36 774 575
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	45 790 566	110 298 812	67 025 056	109 176 179
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	124 672 871	184 220 118	108 120 661	71 651 952
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 489 065 459	2 135 945 285	2 687 363 826	2 386 850 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	328 546 801	388 940 568	395 716 641	395 074 378
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 068 360 658	1 469 345 717	2 093 271 986	1 793 775 622
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	92 158 000	277 659 000	198 375 199	198 000 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	125 945 293	20 000 000	0	0
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	831 884 360	1 069 452 884	466 019 841	499 914 620
JUMLAH/TOTAL		4 411 563 402	4 482 462 584	4 630 963 040	4 163 017 326

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.5

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF JAMBI BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 010 116 940	1 155 350 574	1 436 381 400	1 292 670 701
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	385 042 832	451 050 872	626 110 159	498 167 990
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	311 123 600	372 446 506	527 008 670	423 795 726
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	20 337 125	22 819 119	26 952 822	40 450 100
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	2 724 207	4 498 059	6 303 508	9 350 990
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	50 857 900	51 287 188	65 845 159	24 571 174
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	625 074 108	686 556 647	745 860 901	769 453 511
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	128 281 061	146 944 369	130 385 477	129 185 696
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	122 432 047	124 594 278	122 217 742	131 640 935
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	374 361 000	415 018 000	468 803 682	473 505 880
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	24 454 000	35 121 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	17 743 055	64 410 340	25 049 200
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	280 698 822	310 525 175	359 487 858	386 301 605
JUMLAH/TOTAL		1 290 815 762	1 465 875 749	1 795 869 258	1 678 972 306
*) Data APBD					

TABEL
TABLE 2.6

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTH SUMATERA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 866 212 730	2 135 815 045	2 574 429 820	2 681 672 319
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	741 957 493	847 953 871	1 139 863 990	1 171 652 511
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	650 294 156	748 373 444	1 026 923 856	1 035 104 832
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	5 575 681	11 353 175	13 507 720	12 968 452
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	21 209 406	32 977 131	42 441 999	40 600 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	64 878 250	55 250 121	56 990 415	82 979 227
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 124 255 237	1 280 897 605	1 424 573 687	1 500 609 788
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	253 337 292	312 849 999	294 438 302	344 722 388
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	449 536 945	457 850 606	584 359 252	648 531 520
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	421 381 000	510 197 000	545 776 133	507 355 880
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	6 963 569	9 992 143	9 410 020
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	259 900 775	337 301 961	101 043 442	70 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 126 113 505	2 473 117 006	2 675 473 262	2 751 672 319

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.7

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BENGKULU BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	556 308 031	765 422 617	1 082 518 266	1 007 090 122
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	165 100 789	209 766 374	289 078 260	421 731 338
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	115 792 924	148 121 696	214 208 995	242 593 886
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	31 378 589	37 402 253	42 495 507	56 674 549
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	4 620 305	8 538 030	7 443 690	40 548 765
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 308 971	15 704 395	24 930 068	81 914 138
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	391 160 410	445 656 243	529 784 756	583 033 644
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	7 488 738	38 939 011	37 604 403	40 844 095
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 621 672	859 232	2 088 742	1 573 059
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	378 050 000	405 858 000	482 472 811	487 339 490
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	7 618 800	53 277 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	46 832	110 000 000	263 655 250	2 325 140
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	75 951 032	103 587 915	445 850 386	217 257 136
JUMLAH/TOTAL		632 259 063	869 010 532	1 528 368 652	1 224 347 258
*) Data APBD					

TABEL
TABLE 2.8

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF LAMPUNG BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 294 948 833	1 374 096 047	1 723 036 643	1 697 783 337
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	631 981 956	674 693 660	891 781 560	812 086 713
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	507 987 600	567 498 746	774 613 920	683 970 800
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	65 250 545	61 552 448	71 175 337	76 393 767
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	7 488 182	9 883 550	11 205 126	11 958 810
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	51 255 629	35 758 916	34 787 177	39 763 336
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	662 966 877	686 784 795	817 632 624	833 217 880
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	78 287 508	94 248 257	91 339 873	105 934 330
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	123 781 369	82 880 538	133 030 821	58 761 880
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	460 898 000	509 656 000	570 533 930	628 505 670
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	22 728 000	40 016 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	12 617 592	13 622 459	52 478 744
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	410 233 213	350 625 381	180 319 738	192 341 217
JUMLAH/TOTAL		1 705 182 046	1 724 721 428	1 903 356 381	1 890 124 554

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.9

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BANGKA BELITUNG BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	534 173 639	609 868 624	840 122 439	812 036 492
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	198 173 312	203 541 900	294 184 568	255 263 242
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	173 574 904	173 292 129	260 085 863	240 699 818
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	942 895	1 265 793	3 000 947	2 215 008
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	1 023 524	568 416
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	23 655 513	28 983 978	30 074 234	11 780 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	336 000 327	406 326 724	545 937 871	556 773 250
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	24 467 423	33 012 009	41 571 829	40 345 840
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	35 842 904	53 957 715	93 494 502	65 561 570
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	275 690 000	319 357 000	391 045 440	407 994 840
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	19 826 100	42 871 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	0	0	0
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	227 005 972	290 197 793	254 692 423	191 877 206
JUMLAH/TOTAL		761 179 611	900 066 417	1 094 814 862	1 003 913 698

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.10

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF RIAU ISLANDS BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 131 634 051	1 017 339 174	1 356 574 432	1 330 000 000
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	281 830 846	324 999 591	406 282 784	424 686 505
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	260 511 592	301 460 215	391 240 524	407 182 211
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	378 481	352 158	1 903 566	3 550 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	680 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	20 940 773	23 187 218	13 138 694	13 274 294
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	849 803 205	662 339 583	950 291 648	905 313 495
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	124 792 905	159 814 588	174 674 004	185 871 207
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	546 679 310	169 192 001	480 931 786	295 378 808
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	178 330 990	333 332 994	288 884 858	403 132 480
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	5 801 000	20 931 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	30 000 000	0	0
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	261 061 149	447 501 470	184 315 626	310 000 000
JUMLAH/TOTAL		1 392 695 200	1 464 840 644	1 540 890 058	1 640 000 000

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.11

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF DKI JAKARTA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	14 337 530 976	16 668 046 974	19 221 757 881	20 704 533 259
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	7 817 457 600	8 731 096 245	10 455 565 541	11 134 547 509
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	6 482 649 163	7 202 527 438	8 751 273 783	9 397 012 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	449 340 321	676 461 757	395 639 568	384 640 001
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	131 903 430	144 175 716	163 151 310	180 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	753 564 686	707 931 334	1 145 500 880	1 172 895 508
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	6 520 073 376	7 253 024 683	8 702 813 394	9 540 000 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	5 533 851 713	7 004 187 865	8 526 794 673	9 300 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	213 197 563	128 893 818	176 018 721	240 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	773 024 100	119 943 000	0	0
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	683 926 046	63 378 946	29 985 750
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	3 107 087 921	2 020 596 204	1 364 256 321	1 746 000 000
JUMLAH/TOTAL		17 444 618 897	18 688 643 178	20 586 014 202	22 450 533 259

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.12

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST JAVA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	5 047 199 211	6 008 240 717	7 275 007 134	6 951 984 436
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	3 748 404 051	4 221 668 696	5 275 051 504	5 179 135 839
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	3 449 101 477	3 889 839 395	4 926 338 153	4 835 280 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	31 369 856	30 807 391	35 398 711	28 632 573
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	111 998 489	122 316 435	138 674 865	138 211 462
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	155 934 229	178 705 475	174 639 775	177 011 804
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 298 795 160	1 756 094 285	1 903 729 826	1 763 254 316
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	601 796 182	792 929 158	906 558 068	733 152 541
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	131 245 978	29 729 127	92 812 843	52 864 155
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	565 753 000	933 436 000	904 358 915	977 237 620
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	30 477 736	96 225 804	9 594 281
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 000 895 099	956 424 657	1 350 314 356	1 310 761 917
JUMLAH/TOTAL		6 048 094 310	6 964 665 374	8 625 321 490	8 262 746 353

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.13

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL JAVA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	3 818 467 960	4 363 512 594	5 203 414 609	5 340 393 051
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 630 621 270	2 932 805 173	3 698 843 478	3 658 340 173
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 160 427 370	2 422 799 016	3 068 130 112	2 939 766 264
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	265 390 090	301 213 534	321 963 375	128 883 957
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	93 747 350	95 682 663	131 312 950	154 009 077
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	111 056 460	113 109 960	177 437 041	435 680 875
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 185 860 720	1 419 342 557	1 504 184 018	1 682 052 878
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	291 714 804	361 564 930	443 381 492	538 274 117
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 725 916	7 045 627	7 310 655	9 600 161
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Alocation Funds</i>	890 420 000	1 050 732 000	1 053 491 871	1 130 742 600
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Alocation Funds</i>	0	0	0	3 436 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 985 970	11 364 864	387 113	0
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	814 829 550	431 233 897	848 298 788	694 157 160
JUMLAH/TOTAL		4 633 297 510	4 794 746 491	6 051 713 397	6 034 550 211

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.14

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF DI YOGYAKARTA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	881 144 850	1 306 701 213	1 258 609 946	1 221 594 241
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	436 482 095	488 890 620	632 872 312	596 850 802
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	374 563 344	434 898 894	525 185 354	524 567 435
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	12 454 920	16 979 699	29 259 898	32 843 464
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	11 217 079	11 927 612	12 481 051	14 071 903
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	38 246 752	25 084 415	65 946 009	25 368 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	442 882 532	480 922 835	601 802 167	618 381 981
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	40 377 303	43 543 835	70 549 425	61 043 321
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	21 229	0	11 348	8 710
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	402 484 000	437 379 000	511 773 394	523 919 950
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	19 468 000	33 410 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 780 223	336 887 758	23 935 467	6 361 458
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	189 400 980	210 869 773	537 060 364	206 829 744
JUMLAH/TOTAL		1 070 545 830	1 517 570 986	1 795 670 310	1 428 423 985

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.15

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF EAST JAVA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	5 103 267 666	5 940 048 020	7 075 105 413	5 950 571 845
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	3 703 283 577	4 164 250 657	5 212 319 316	3 886 986 440
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	3 256 903 358	3 574 886 241	4 481 791 544	3 267 125 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	261 665 588	261 100 679	309 323 367	55 390 193
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	61 252 024	99 510 837	195 402 284	218 093 650
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	123 462 607	228 752 900	225 802 121	346 377 597
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 376 748 105	1 755 896 027	1 798 151 003	1 869 633 251
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	529 628 905	641 893 165	775 290 376	721 521 516
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	26 346 200	22 847 862	0	11 632 385
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	820 773 000	1 091 155 000	1 022 860 627	1 118 478 350
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	18 001 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	23 235 984	19 901 336	64 635 094	193 952 154
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 245 199 284	915 169 863	1 723 922 045	467 075 903
JUMLAH/TOTAL		6 348 466 950	6 855 217 883	8 799 027 458	6 417 647 748

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.16

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BANTEN BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 587 901 993	1 908 840 531	2 351 380 505	2 220 917 360
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 118 023 281	1 298 456 276	1 661 168 634	1 526 456 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 071 092 401	1 246 280 795	1 601 610 635	1 474 100 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	2 709 167	3 052 565	3 184 527	2 949 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	13 201 473	17 834 634	21 478 617	21 107 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	31 020 240	31 288 282	34 894 855	28 300 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	465 377 434	607 804 085	686 651 066	690 961 360
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	219 851 656	273 756 916	324 786 786	297 161 080
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	231 778	3 450 169	1 023 419	500 190
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	245 294 000	330 597 000	342 743 861	361 179 090
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	18 097 000	32 121 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	4 501 278	2 580 170	3 560 805	3 500 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	352 917 848	157 157 181	149 104 130	159 198 104
JUMLAH/TOTAL		1 940 819 841	2 065 997 712	2 500 484 635	2 380 115 464

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.17

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BALI BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 150 934 290	1 368 004 401	1 667 342 648	1 409 543 102
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	729 338 160	834 475 055	1 057 791 777	851 117 844
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	638 538 480	735 938 193	945 973 962	750 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	11 684 380	15 321 960	18 948 030	18 405 494
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	40 839 900	46 934 734	45 593 209	40 606 549
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	38 275 400	36 280 168	47 276 576	42 105 801
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	421 596 130	525 304 234	576 550 871	556 948 660
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	67 808 574	88 771 234	115 383 052	87 127 240
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	481 556	0	0	0
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	353 306 000	436 533 000	448 187 419	448 187 420
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	12 980 400	21 634 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	8 225 112	33 000 000	1 476 598
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	256 422 410	178 282 654	282 503 094	258 329 975
JUMLAH/TOTAL		1 407 356 700	1 546 287 055	1 949 845 742	1 667 873 077
*) <i>Data APBD</i>					

TABEL
TABLE 2.18

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST NUSA TENGGARA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	740 870 869	863 206 508	1 066 716 532	1 244 400 756
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	265 025 384	328 753 204	430 222 359	468 210 246
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	190 480 828	258 830 917	348 568 544	349 902 076
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	25 658 802	28 375 766	37 635 219	51 887 132
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	23 281 278	14 747 529	17 161 166	23 834 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	25 604 476	26 798 992	26 857 430	42 587 038
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	475 845 485	534 453 304	626 994 173	771 690 510
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	49 121 165	57 342 362	59 770 703	82 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	22 579 320	29 452 942	18 721 992	33 054 550
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	404 145 000	447 658 000	511 286 478	608 611 960
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	37 215 000	48 024 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	0	9 500 000	4 500 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	75 990 834	65 133 785	71 073 304	85 662 695
JUMLAH/TOTAL		816 861 703	928 340 293	1 137 789 836	1 330 063 451

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.19

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF EAST NUSA TENGGARA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	704 101 271	875 624 704	946 026 752	954 424 000
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	175 951 830	198 296 335	237 286 164	223 847 850
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	101 615 740	112 971 617	150 722 922	136 662 800
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	27 074 633	31 666 968	32 817 661	35 345 705
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	10 500 472	13 738 418	12 707 326	14 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	36 760 985	39 919 332	41 038 255	37 339 345
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	528 149 441	608 328 369	708 740 588	730 576 150
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	48 562 402	54 686 738	53 762 651	61 068 940
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	151 039	52 631	57 683	146 410
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	479 436 000	553 589 000	616 601 854	616 601 800
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	38 318 400	52 759 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	69 000 000	0	0
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	294 705 889	348 582 927	310 377 666	122 199 375
JUMLAH/TOTAL		998 807 160	1 224 207 631	1 256 404 418	1 076 623 375

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.20

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 047 098 094	1 185 930 369	1 474 197 546	1 478 166 143
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	377 846 301	471 327 210	586 814 658	514 888 875
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	315 458 450	365 324 752	494 929 572	421 870 948
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	31 908 130	32 931 581	39 085 749	53 143 298
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	10 471 627	14 924 782	18 239 410	20 300 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	20 008 094	58 146 095	34 559 927	19 574 629
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	669 251 793	711 607 636	865 203 181	920 964 638
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	74 546 267	89 051 537	94 135 838	95 783 328
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	8 678 526	11 666 099	11 891 129	27 033 160
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	586 027 000	610 890 000	728 080 795	744 834 150
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	31 095 419	53 314 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	2 995 523	22 179 707	42 312 630
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	62 788 210	141 165 668	134 331 750	70 300 000
JUMLAH/TOTAL		1 109 886 304	1 327 096 037	1 608 529 296	1 548 466 143

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.21

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	889 459 523	1 064 754 305	1 246 835 944	1 572 965 940
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	215 751 229	273 180 273	380 665 559	465 125 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	177 793 231	226 464 408	318 109 354	378 570 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	17 528 750	17 201 576	23 495 499	25 194 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	7 096 250	12 725 874	12 297 018	19 515 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 332 998	16 788 415	26 763 688	41 845 500
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	673 708 294	726 574 032	859 670 385	1 026 558 940
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	88 646 309	110 996 687	108 900 477	213 440 730
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	33 061 985	44 287 345	40 377 818	59 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	552 000 000	571 290 000	670 213 090	694 822 210
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	40 179 000	59 296 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	65 000 000	6 500 000	81 282 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	93 808 130	121 727 557	205 554 131	145 977 802
JUMLAH/TOTAL		983 267 653	1 186 481 862	1 452 390 075	1 718 943 742
*) <i>Data APBD</i>					

TABEL
TABLE 2.22

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTH KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 179 994 168	1 385 078 532	1 875 797 122	1 638 464 720
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	585 031 999	690 490 971	1 052 561 036	853 488 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	478 480 924	563 757 928	904 946 734	727 698 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	43 047 603	70 675 152	21 362 670	20 620 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	9 313 381	20 066 964	19 000 527	19 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	54 190 091	35 990 927	107 251 105	85 670 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	594 962 169	623 583 487	790 997 259	756 016 720
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	100 918 609	108 149 996	114 685 226	118 500 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	115 377 560	87 439 491	173 713 826	110 800 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	378 666 000	427 994 000	466 559 207	483 364 720
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	36 039 000	43 352 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	71 004 074	32 238 827	28 960 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	195 626 451	201 618 017	269 666 395	67 500 000
JUMLAH/TOTAL		1 375 620 619	1 586 696 549	2 145 463 517	1 705 964 720

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.23

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF EAST KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	4 847 421 022	4 499 534 124	6 127 503 221	5 011 283 225
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 196 995 516	1 381 716 721	2 070 292 604	1 588 512 940
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	787 649 943	1 027 536 236	1 561 637 233	1 225 850 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	108 608 509	2 570 758	182 804 915	154 684 940
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	29 999 189	60 174 536	73 576 449	88 750 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	270 737 875	291 435 191	252 274 007	119 228 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	3 465 865 506	3 096 452 203	4 050 186 678	3 141 570 285
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	513 380 594	588 794 319	548 180 146	515 888 102
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 879 936 912	2 271 914 884	3 375 771 283	2 562 567 753
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	72 548 000	235 743 000	126 235 249	63 114 430
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	184 560 000	21 365 200	7 023 939	281 200 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 999 681 766	3 083 537 760	2 361 237 901	750 000 000
JUMLAH/TOTAL		6 847 102 788	7 583 071 884	8 488 741 122	5 761 283 225

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.24

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NORTH SULAWESI BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	653 592 446	807 320 996	965 147 321	1 028 715 617
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	211 236 498	252 324 235	322 580 793	309 720 017
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	166 801 206	212 415 369	288 295 726	275 626 017
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	8 255 493	4 723 425	6 188 412	7 594 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	24 905 230	27 004 390	12 902 773	16 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	11 274 569	8 181 051	15 193 882	10 000 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	442 355 948	496 496 761	613 566 528	668 995 600
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	36 737 091	48 336 199	51 658 171	56 516 390
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 294 857	1 066 024	913 190	965 280
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	404 324 000	447 094 538	532 916 167	558 634 930
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	28 079 000	52 879 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	58 500 000	29 000 000	50 000 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	66 024 839	35 372 752	385 989 059	341 835 932
JUMLAH/TOTAL		719 617 285	842 693 748	1 351 136 380	1 370 551 549

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.25

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL SULAWESI BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	682 525 017	792 616 920	1 042 484 623	1 064 459 478
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	160 508 900	194 190 569	278 853 995	234 342 620
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	135 032 260	167 521 648	245 120 991	204 592 741
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	15 732 897	13 637 325	19 892 824	18 551 592
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	1 340 739	3 942 742	4 093 853	4 206 647
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	8 403 004	9 088 854	9 746 327	6 991 640
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	521 910 355	562 092 462	701 889 829	740 163 320
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	41 372 066	56 292 949	52 187 114	49 383 430
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 870 289	3 670 517	4 379 754	1 325 700
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	477 668 000	502 128 996	606 544 317	629 397 190
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	38 778 644	60 057 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	105 762	36 333 889	61 740 799	89 953 538
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	47 204 072	25 524 876	108 000 559	58 099 357
JUMLAH/TOTAL		729 729 089	818 141 796	1 150 485 182	1 122 558 835

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.26

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTH SULAWESI BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 480 115 047	1 809 498 887	2 133 624 783	2 209 465 232
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	775 509 546	992 252 464	1 238 690 402	1 301 646 108
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	660 156 134	850 491 375	1 068 165 045	1 125 026 110
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	55 478 976	56 489 993	72 972 983	91 984 773
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	37 178 147	46 243 085	54 831 924	57 113 204
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	22 696 289	39 028 011	42 720 450	27 522 021
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	677 865 697	810 026 105	894 934 381	907 819 124
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	150 047 282	169 232 074	177 167 583	181 192 382
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	18 280 415	41 286 031	25 918 855	18 355 352
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	509 538 000	599 508 000	656 710 943	663 422 390
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	35 137 000	44 849 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	26 739 804	7 220 318	0	0
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	190 188 442	266 251 110	208 669 551	82 264 617
JUMLAH/TOTAL		1 670 303 489	2 075 749 997	2 342 294 334	2 291 729 849

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.27

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTHEAST SULAWESI BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	598 368 956	709 299 741	957 848 767	1 264 927 000
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	120 632 754	174 858 741	296 603 457	472 992 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	85 577 499	125 156 241	150 462 599	188 247 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	12 251 122	18 810 525	19 790 109	23 560 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	5 350 427	11 690 000	11 732 028	10 588 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	17 453 706	19 201 975	114 618 721	250 597 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	477 736 202	516 641 000	657 211 240	728 363 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	43 079 986	45 195 265	50 637 799	68 080 402
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	8 302 216	9 604 735	10 272 059	14 120 598
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	426 354 000	461 841 000	566 435 382	589 844 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	29 866 000	56 318 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	17 800 000	4 034 070	63 572 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	36 325 654	62 761 318	61 603 700	158 364 000
JUMLAH/TOTAL		634 694 610	772 061 059	1 019 452 467	1 423 291 000

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.28

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF GORONTALO BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	460 791 544	521 582 664	536 574 283	534 504 910
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	54 115 211	70 077 515	94 511 961	76 980 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	44 707 905	59 221 735	82 572 431	72 160 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	85 662	0	0	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	5 000	163 912	500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	9 321 644	10 850 780	11 775 618	4 320 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	406 259 368	308 900 309	413 118 212	457 524 910
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	14 683 205	16 658 938	18 679 714	17 029 150
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	186 163	847 371	426 502	824 500
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	391 390 000	291 394 000	368 637 996	388 325 260
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	25 374 000	51 346 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	416 965	142 604 840	28 944 110	0
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	6 485 870	73 948 507	128 731 650	154 134 197
JUMLAH/TOTAL		467 277 414	595 531 171	665 305 933	688 639 107

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.29

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST SULAWESI BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	325 557 827	365 768 221	510 759 425	574 142 329
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	35 390 237	47 056 499	61 855 624	64 000 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	30 697 910	39 710 161	54 259 243	54 584 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	659 882	679 010	1 346 143	1 371 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	4 032 445	6 667 328	6 250 238	8 044 500
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	283 882 465	304 795 787	432 964 939	483 913 510
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	18 479 769	24 829 420	20 304 273	26 241 058
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	195 696	713 367	247 994	558 942
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	255 207 000	279 253 000	366 674 672	391 060 510
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	10 000 000	0	45 738 000	66 053 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	6 285 125	13 915 935	15 938 862	26 228 819
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	22 243 637	29 533 700	70 248 928	30 771 857
JUMLAH/TOTAL		347 801 464	395 301 921	581 008 353	604 914 186

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.30

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF MALUKU BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	558 231 780	911 329 531	786 335 010	916 236 179
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	79 080 170	104 446 477	120 041 354	157 725 189
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	49 194 830	67 143 369	87 892 220	96 075 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	17 170 940	16 335 877	19 480 368	33 749 389
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	500 000	500 000	1 034 628	17 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	12 214 400	20 467 231	11 634 138	10 900 800
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	477 886 900	535 176 984	648 432 736	726 010 990
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	48 625 067	56 355 571	56 952 774	71 957 750
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 124 833	2 773 413	2 292 760	7 622 440
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	425 137 000	476 048 000	556 236 402	578 163 800
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	32 950 800	68 267 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 264 710	271 706 070	17 860 920	32 500 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	32 908 750	43 191 584	62 415 818	21 846 597
JUMLAH/TOTAL		591 140 530	954 521 115	848 750 828	938 082 776

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.31

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NORTH MALUKU BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	449 495 072	544 406 748	676 545 728	721 409 409
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	49 516 624	57 107 812	75 338 211	80 630 164
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	24 157 692	38 152 300	55 753 310	50 940 300
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	5 020 490	7 793 049	4 855 112	11 472 580
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	20 338 442	11 162 463	14 729 789	18 217 284
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	399 978 448	487 298 936	571 207 517	611 729 245
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	43 343 061	40 914 565	50 520 990	46 100 752
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	18 030 703	50 660 371	32 723 068	47 826 833
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	338 604 684	370 724 000	451 481 459	458 511 660
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	25 000 000	36 482 000	59 290 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	0	30 000 000	29 050 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	0	22 159 758	26 220 676	50 000 000
JUMLAH/TOTAL		449 495 072	566 566 506	702 766 404	771 409 409

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.32

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF PAPUA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	4 895 058 660	5 898 149 348	5 757 078 135	5 322 085 000
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	214 585 830	345 419 705	357 741 755	345 398 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	163 238 210	194 176 032	259 185 992	240 750 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	15 485 140	20 526 259	19 710 392	22 500 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 212 880	22 640 988	26 418 178	22 563 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	23 649 600	108 076 426	52 427 193	59 585 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 192 188 830	2 043 981 643	1 436 993 483	1 566 891 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	191 712 117	209 648 403	198 461 592	216 515 805
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	190 239 713	208 038 244	201 897 066	217 484 195
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	810 237 000	876 294 996	1 002 431 825	1 058 228 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	750 000 000	34 203 000	74 663 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 488 284 000	3 508 748 000	3 962 342 897	3 409 796 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	0	535 610 092	0	0
JUMLAH/TOTAL		4 895 058 660	6 433 759 440	5 757 078 135	5 322 085 000

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.33

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST PAPUA BY RECEIPT ITEMS
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	539 190 302	687 364 004	1 502 766 461	2 881 160 000
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	12 143 880	32 795 543	76 490 048	64 920 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	6 000 000	25 436 798	66 519 244	60 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	0	73 100	21 668	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	6 143 880	7 285 645	9 949 136	4 920 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	527 046 422	654 568 461	856 776 413	1 097 780 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	155 005 422	148 744 071	175 669 065	336 997 098
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	11 500 000	40 953 390	52 619 814	97 202 902
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	350 541 000	464 871 000	578 084 261	595 000 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	10 000 000	0	50 403 273	68 580 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	0	569 500 000	1 718 460 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	0	196 892 987	193 508 717	108 550 000
JUMLAH/TOTAL		539 190 302	884 256 991	1 696 275 178	2 989 710 000
*) Data APBD					

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

TABEL 3.A
TABLE

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	4 067 191 813	3 012 478 243	6 911 764 845	6 732 212 000
2.	Sumatera Utara	2 299 465 405	2 685 787 991	3 225 853 317	3 248 999 615
3.	Sumatera Barat	1 058 664 158	1 281 399 813	1 723 767 565	1 523 895 516
4.	R i a u	3 579 679 042	3 413 009 700	4 164 943 199	3 663 102 706
5.	J a m b i	1 010 116 940	1 155 350 574	1 436 381 400	1 292 670 701
6.	Sumatera Selatan	1 866 212 730	2 135 815 045	2 574 429 820	2 681 672 319
7.	Bengkulu	556 308 031	765 422 617	1 082 518 266	1 007 090 122
8.	Lampung	1 294 948 833	1 374 096 047	1 723 036 643	1 697 783 337
9.	Bangka Belitung	534 173 639	609 868 624	840 122 439	812 036 492
10.	Kepulauan Riau	1 131 634 051	1 017 339 174	1 356 574 432	1 330 000 000
11.	DKI Jakarta	14 337 530 976	16 668 046 974	19 221 757 881	20 704 533 259
12.	Jawa Barat	5 047 199 211	6 008 240 717	7 275 007 134	6 951 984 436
13.	Jawa Tengah	3 818 467 960	4 363 512 594	5 203 414 609	5 340 393 051
14.	D I Yogyakarta	881 144 850	1 306 701 213	1 258 609 946	1 221 594 241
15.	Jawa Timur	5 103 267 666	5 940 048 020	7 075 105 413	5 950 571 845
16.	Banten	1 587 901 993	1 908 840 531	2 351 380 505	2 220 917 360
17.	B a l i	1 150 934 290	1 368 004 401	1 667 342 648	1 409 543 102
18.	Nusa Tenggara Barat	740 870 869	863 206 508	1 066 716 532	1 244 400 756
19.	Nusa Tenggara Timur	704 101 271	875 624 704	946 026 752	954 424 000
20.	Kalimantan Barat	1 047 098 094	1 185 930 369	1 474 197 546	1 478 166 143
21.	Kalimantan Tengah	889 459 523	1 064 754 305	1 246 835 944	1 572 965 940
22.	Kalimantan Selatan	1 179 994 168	1 385 078 532	1 875 797 122	1 638 464 720
23.	Kalimantan Timur	4 847 421 022	4 499 534 124	6 127 503 221	5 011 283 225
24.	Sulawesi Utara	653 592 446	807 320 996	965 147 321	1 028 715 617
25.	Sulawesi Tengah	682 525 017	792 616 920	1 042 484 623	1 064 459 478
26.	Sulawesi Selatan	1 480 115 047	1 809 498 887	2 133 624 783	2 209 465 232
27.	Sulawesi Tenggara	598 368 956	709 299 741	957 848 767	1 264 927 000
28.	Gorontalo	460 791 544	521 582 664	536 574 283	534 504 910
29.	Sulawesi Barat	325 557 827	365 768 221	510 759 425	574 142 329
30.	M a l u k u	558 231 780	911 329 531	786 335 010	916 236 179
31.	Maluku Utara	449 495 072	544 406 748	676 545 728	721 409 409
32.	P a p u a	4 895 058 660	5 898 149 348	5 757 078 135	5 322 085 000
33.	Papua Barat	539 190 302	687 364 004	1 502 766 461	2 881 160 000
JUMLAH/TOTAL		69 376 713 186	77 935 427 880	96 698 251 715	96 205 810 040

*) Data APBD

TABEL 3.1
TABLE

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	476 909 834	587 487 310	716 290 965	795 872 000
2.	Sumatera Utara	1 502 608 215	1 693 846 305	2 181 311 593	2 104 202 616
3.	Sumatera Barat	494 929 543	571 607 517	790 087 768	723 757 576
4.	R i a u	964 668 290	1 257 064 415	1 477 579 373	1 276 252 706
5.	J a m b i	385 042 832	451 050 872	626 110 159	498 167 990
6.	Sumatera Selatan	741 957 493	847 953 871	1 139 863 990	1 171 652 511
7.	Bengkulu	165 100 789	209 766 374	289 078 260	421 731 338
8.	Lampung	631 981 956	674 693 660	891 781 560	812 086 713
9.	Bangka Belitung	198 173 312	203 541 900	294 184 568	255 263 242
10.	Kepulauan Riau	281 830 846	324 999 591	406 282 784	424 686 505
11.	DKI Jakarta	7 817 457 600	8 731 096 245	10 455 565 541	11 134 547 509
12.	Jawa Barat	3 748 404 051	4 221 668 696	5 275 051 504	5 179 135 839
13.	Jawa Tengah	2 630 621 270	2 932 805 173	3 698 843 478	3 658 340 173
14.	D I Yogyakarta	436 482 095	488 890 620	632 872 312	596 850 802
15.	Jawa Timur	3 703 283 577	4 164 250 657	5 212 319 316	3 886 986 440
16.	Banten	1 118 023 281	1 298 456 276	1 661 168 634	1 526 456 000
17.	B a l i	729 338 160	834 475 055	1 057 791 777	851 117 844
18.	Nusa Tenggara Barat	265 025 384	328 753 204	430 222 359	468 210 246
19.	Nusa Tenggara Timur	175 951 830	198 296 335	237 286 164	223 847 850
20.	Kalimantan Barat	377 846 301	471 327 210	586 814 658	514 888 875
21.	Kalimantan Tengah	215 751 229	273 180 273	380 665 559	465 125 000
22.	Kalimantan Selatan	585 031 999	690 490 971	1 052 561 036	853 488 000
23.	Kalimantan Timur	1 196 995 516	1 381 716 721	2 070 292 604	1 588 512 940
24.	Sulawesi Utara	211 236 498	252 324 235	322 580 793	309 720 017
25.	Sulawesi Tengah	160 508 900	194 190 569	278 853 995	234 342 620
26.	Sulawesi Selatan	775 509 546	992 252 464	1 238 690 402	1 301 646 108
27.	Sulawesi Tenggara	120 632 754	174 858 741	296 603 457	472 992 000
28.	Gorontalo	54 115 211	70 077 515	94 511 961	76 980 000
29.	Sulawesi Barat	35 390 237	47 056 499	61 855 624	64 000 000
30.	M a l u k u	79 080 170	104 446 477	120 041 354	157 725 189
31.	Maluku Utara	49 516 624	57 107 812	75 338 211	80 630 164
32.	P a p u a	214 585 830	345 419 705	357 741 755	345 398 000
33.	Papua Barat	12 143 880	32 795 543	76 490 048	64 920 000
JUMLAH/TOTAL		30 556 135 053	35 107 948 811	44 486 733 562	42 539 534 813

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.1

REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI
SELURUH INDONESIA
ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	309 612 956	362 835 198	464 317 355	476 975 000
2.	Sumatera Utara	1 366 445 063	1 542 508 891	2 002 004 605	1 946 447 000
3.	Sumatera Barat	409 139 881	479 453 172	670 371 641	617 070 002
4.	R i a u	764 546 115	926 592 209	1 274 416 993	1 058 650 000
5.	J a m b i	311 123 600	372 446 506	527 008 670	423 795 726
6.	Sumatera Selatan	650 294 156	748 373 444	1 026 923 856	1 035 104 832
7.	Bengkulu	115 792 924	148 121 696	214 208 995	242 593 886
8.	Lampung	507 987 600	567 498 746	774 613 920	683 970 800
9.	Bangka Belitung	173 574 904	173 292 129	260 085 863	240 699 818
10.	Kepulauan Riau	260 511 592	301 460 215	391 240 524	407 182 211
11.	DKI Jakarta	6 482 649 163	7 202 527 438	8 751 273 783	9 397 012 000
12.	Jawa Barat	3 449 101 477	3 889 839 395	4 926 338 153	4 835 280 000
13.	Jawa Tengah	2 160 427 370	2 422 799 016	3 068 130 112	2 939 766 264
14.	D I Yogyakarta	374 563 344	434 898 894	525 185 354	524 567 435
15.	Jawa Timur	3 256 903 358	3 574 886 241	4 481 791 544	3 267 125 000
16.	Banten	1 071 092 401	1 246 280 795	1 601 610 635	1 474 100 000
17.	B a l i	638 538 480	735 938 193	945 973 962	750 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	190 480 828	258 830 917	348 568 544	349 902 076
19.	Nusa Tenggara Timur	101 615 740	112 971 617	150 722 922	136 662 800
20.	Kalimantan Barat	315 458 450	365 324 752	494 929 572	421 870 948
21.	Kalimantan Tengah	177 793 231	226 464 408	318 109 354	378 570 000
22.	Kalimantan Selatan	478 480 924	563 757 928	904 946 734	727 698 000
23.	Kalimantan Timur	787 649 943	1 027 536 236	1 561 637 233	1 225 850 000
24.	Sulawesi Utara	166 801 206	212 415 369	288 295 726	275 626 017
25.	Sulawesi Tengah	135 032 260	167 521 648	245 120 991	204 592 741
26.	Sulawesi Selatan	660 156 134	850 491 375	1 068 165 045	1 125 026 110
27.	Sulawesi Tenggara	85 577 499	125 156 241	150 462 599	188 247 000
28.	Gorontalo	44 707 905	59 221 735	82 572 431	72 160 000
29.	Sulawesi Barat	30 697 910	39 710 161	54 259 243	54 584 000
30.	M a l u k u	49 194 830	67 143 369	87 892 220	96 075 000
31.	Maluku Utara	24 157 692	38 152 300	55 753 310	50 940 300
32.	P a p u a	163 238 210	194 176 032	259 185 992	240 750 000
33.	Papua Barat	6 000 000	25 436 798	66 519 244	60 000 000
JUMLAH/TOTAL		25 719 347 146	29 464 063 064	38 042 637 125	35 928 894 966

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.2

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH
SELURUH INDONESIA
ACTUAL LOCAL REVENUE RETRIBUTION OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	6 942 878	8 321 996	12 002 090	13 264 165
2.	Sumatera Utara	11 714 728	13 611 810	29 409 174	25 552 581
3.	Sumatera Barat	10 785 842	32 386 371	50 673 617	26 667 824
4.	R i a u	29 658 738	35 953 276	28 016 663	36 774 575
5.	J a m b i	20 337 125	22 819 119	26 952 822	40 450 100
6.	Sumatera Selatan	5 575 681	11 353 175	13 507 720	12 968 452
7.	Bengkulu	31 378 589	37 402 253	42 495 507	56 674 549
8.	Lampung	65 250 545	61 552 448	71 175 337	76 393 767
9.	Bangka Belitung	942 895	1 265 793	3 000 947	2 215 008
10.	Kepulauan Riau	378 481	352 158	1 903 566	3 550 000
11.	DKI Jakarta	449 340 321	676 461 757	395 639 568	384 640 001
12.	Jawa Barat	31 369 856	30 807 391	35 398 711	28 632 573
13.	Jawa Tengah	265 390 090	301 213 534	321 963 375	128 883 957
14.	D I Yogyakarta	12 454 920	16 979 699	29 259 898	32 843 464
15.	Jawa Timur	261 665 588	261 100 679	309 323 367	55 390 193
16.	Banten	2 709 167	3 052 565	3 184 527	2 949 000
17.	B a l i	11 684 380	15 321 960	18 948 030	18 405 494
18.	Nusa Tenggara Barat	25 658 802	28 375 766	37 635 219	51 887 132
19.	Nusa Tenggara Timur	27 074 633	31 666 968	32 817 661	35 345 705
20.	Kalimantan Barat	31 908 130	32 931 581	39 085 749	53 143 298
21.	Kalimantan Tengah	17 528 750	17 201 576	23 495 499	25 194 500
22.	Kalimantan Selatan	43 047 603	70 675 152	21 362 670	20 620 000
23.	Kalimantan Timur	108 608 509	2 570 758	182 804 915	154 684 940
24.	Sulawesi Utara	8 255 493	4 723 425	6 188 412	7 594 000
25.	Sulawesi Tengah	15 732 897	13 637 325	19 892 824	18 551 592
26.	Sulawesi Selatan	55 478 976	56 489 993	72 972 983	91 984 773
27.	Sulawesi Tenggara	12 251 122	18 810 525	19 790 109	23 560 000
28.	Gorontalo	85 662	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	659 882	679 010	1 346 143	1 371 500
30.	M a l u k u	17 170 940	16 335 877	19 480 368	33 749 389
31.	Maluku Utara	5 020 490	7 793 049	4 855 112	11 472 580
32.	P a p u a	15 485 140	20 526 259	19 710 392	22 500 000
33.	Papua Barat	0	73 100	21 668	0
JUMLAH/TOTAL		1 601 546 853	1 852 446 348	1 894 314 643	1 497 915 112

*) Data APBD

TABEL 3.1.3
TABLE

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH INDONESIA
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT CORPORATE
AND SEPARATED PROVINCIAL GOVERNMENT WEALTH THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	18 493 041	44 328 326	66 796 142	74 512 000
2.	Sumatera Utara	90 291 200	74 138 551	89 673 273	96 820 000
3.	Sumatera Barat	25 574 011	29 889 087	36 480 958	37 120 000
4.	R i a u	45 790 566	110 298 812	67 025 056	109 176 179
5.	J a m b i	2 724 207	4 498 059	6 303 508	9 350 990
6.	Sumatera Selatan	21 209 406	32 977 131	42 441 999	40 600 000
7.	Bengkulu	4 620 305	8 538 030	7 443 690	40 548 765
8.	Lampung	7 488 182	9 883 550	11 205 126	11 958 810
9.	Bangka Belitung	0	0	1 023 524	568 416
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	680 000
11.	DKI Jakarta	131 903 430	144 175 716	163 151 310	180 000 000
12.	Jawa Barat	111 998 489	122 316 435	138 674 865	138 211 462
13.	Jawa Tengah	93 747 350	95 682 663	131 312 950	154 009 077
14.	D I Yogyakarta	11 217 079	11 927 612	12 481 051	14 071 903
15.	Jawa Timur	61 252 024	99 510 837	195 402 284	218 093 650
16.	Banten	13 201 473	17 834 634	21 478 617	21 107 000
17.	B a l i	40 839 900	46 934 734	45 593 209	40 606 549
18.	Nusa Tenggara Barat	23 281 278	14 747 529	17 161 166	23 834 000
19.	Nusa Tenggara Timur	10 500 472	13 738 418	12 707 326	14 500 000
20.	Kalimantan Barat	10 471 627	14 924 782	18 239 410	20 300 000
21.	Kalimantan Tengah	7 096 250	12 725 874	12 297 018	19 515 000
22.	Kalimantan Selatan	9 313 381	20 066 964	19 000 527	19 500 000
23.	Kalimantan Timur	29 999 189	60 174 536	73 576 449	88 750 000
24.	Sulawesi Utara	24 905 230	27 004 390	12 902 773	16 500 000
25.	Sulawesi Tengah	1 340 739	3 942 742	4 093 853	4 206 647
26.	Sulawesi Selatan	37 178 147	46 243 085	54 831 924	57 113 204
27.	Sulawesi Tenggara	5 350 427	11 690 000	11 732 028	10 588 000
28.	Gorontalo	0	5 000	163 912	500 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	500 000	500 000	1 034 628	17 000 000
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	P a p u a	12 212 880	22 640 988	26 418 178	22 563 000
33.	Papua Barat	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		852 500 283	1 101 338 485	1 300 646 754	1 502 304 652

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH

TABEL 3.1.4
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL PROVINCIAL GOV. REVENUE FROM OTHER PROVINCIAL GOV. ORIGINAL REVENUE
THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	141 860 959	172 001 790	173 175 378	231 120 835
2.	Sumatera Utara	34 157 224	63 587 053	60 224 541	35 383 035
3.	Sumatera Barat	49 429 809	29 878 887	32 561 552	42 899 750
4.	R i a u	124 672 871	184 220 118	108 120 661	71 651 952
5.	J a m b i	50 857 900	51 287 188	65 845 159	24 571 174
6.	Sumatera Selatan	64 878 250	55 250 121	56 990 415	82 979 227
7.	Bengkulu	13 308 971	15 704 395	24 930 068	81 914 138
8.	Lampung	51 255 629	35 758 916	34 787 177	39 763 336
9.	Bangka Belitung	23 655 513	28 983 978	30 074 234	11 780 000
10.	Kepulauan Riau	20 940 773	23 187 218	13 138 694	13 274 294
11.	DKI Jakarta	753 564 686	707 931 334	1 145 500 880	1 172 895 508
12.	Jawa Barat	155 934 229	178 705 475	174 639 775	177 011 804
13.	Jawa Tengah	111 056 460	113 109 960	177 437 041	435 680 875
14.	D I Yogyakarta	38 246 752	25 084 415	65 946 009	25 368 000
15.	Jawa Timur	123 462 607	228 752 900	225 802 121	346 377 597
16.	Banten	31 020 240	31 288 282	34 894 855	28 300 000
17.	B a l i	38 275 400	36 280 168	47 276 576	42 105 801
18.	Nusa Tenggara Barat	25 604 476	26 798 992	26 857 430	42 587 038
19.	Nusa Tenggara Timur	36 760 985	39 919 332	41 038 255	37 339 345
20.	Kalimantan Barat	20 008 094	58 146 095	34 559 927	19 574 629
21.	Kalimantan Tengah	13 332 998	16 788 415	26 763 688	41 845 500
22.	Kalimantan Selatan	54 190 091	35 990 927	107 251 105	85 670 000
23.	Kalimantan Timur	270 737 875	291 435 191	252 274 007	119 228 000
24.	Sulawesi Utara	11 274 569	8 181 051	15 193 882	10 000 000
25.	Sulawesi Tengah	8 403 004	9 088 854	9 746 327	6 991 640
26.	Sulawesi Selatan	22 696 289	39 028 011	42 720 450	27 522 021
27.	Sulawesi Tenggara	17 453 706	19 201 975	114 618 721	250 597 000
28.	Gorontalo	9 321 644	10 850 780	11 775 618	4 320 000
29.	Sulawesi Barat	4 032 445	6 667 328	6 250 238	8 044 500
30.	M a l u k u	12 214 400	20 467 231	11 634 138	10 900 800
31.	Maluku Utara	20 338 442	11 162 463	14 729 789	18 217 284
32.	P a p u a	23 649 600	108 076 426	52 427 193	59 585 000
33.	Papua Barat	6 143 880	7 285 645	9 949 136	4 920 000
JUMLAH/TOTAL		2 382 740 771	2 690 100 914	3 249 135 040	3 610 420 083

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN
SELURUH INDONESIA MENURUT PROVINSI
ACTUAL REVENUE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	2 312 771 517	1 804 922 903	2 605 330 983	2 208 058 000
2.	Sumatera Utara	782 842 712	951 081 298	1 039 050 126	1 118 068 902
3.	Sumatera Barat	554 231 885	633 865 693	744 202 076	786 622 940
4.	R i a u	2 489 065 459	2 135 945 285	2 687 363 826	2 386 850 000
5.	J a m b i	625 074 108	686 556 647	745 860 901	769 453 511
6.	Sumatera Selatan	1 124 255 237	1 280 897 605	1 424 573 687	1 500 609 788
7.	Bengkulu	391 160 410	445 656 243	529 784 756	583 033 644
8.	Lampung	662 966 877	686 784 795	817 632 624	833 217 880
9.	Bangka Belitung	336 000 327	406 326 724	545 937 871	556 773 250
10.	Kepulauan Riau	849 803 205	662 339 583	950 291 648	905 313 495
11.	DKI Jakarta	6 520 073 376	7 253 024 683	8 702 813 394	9 540 000 000
12.	Jawa Barat	1 298 795 160	1 756 094 285	1 903 729 826	1 763 254 316
13.	Jawa Tengah	1 185 860 720	1 419 342 557	1 504 184 018	1 682 052 878
14.	D I Yogyakarta	442 882 532	480 922 835	601 802 167	618 381 981
15.	Jawa Timur	1 376 748 105	1 755 896 027	1 798 151 003	1 869 633 251
16.	Banten	465 377 434	607 804 085	686 651 066	690 961 360
17.	B a l i	421 596 130	525 304 234	576 550 871	556 948 660
18.	Nusa Tenggara Barat	475 845 485	534 453 304	626 994 173	771 690 510
19.	Nusa Tenggara Timur	528 149 441	608 328 369	708 740 588	730 576 150
20.	Kalimantan Barat	669 251 793	711 607 636	865 203 181	920 964 638
21.	Kalimantan Tengah	673 708 294	726 574 032	859 670 385	1 026 558 940
22.	Kalimantan Selatan	594 962 169	623 583 487	790 997 259	756 016 720
23.	Kalimantan Timur	3 465 865 506	3 096 452 203	4 050 186 678	3 141 570 285
24.	Sulawesi Utara	442 355 948	496 496 761	613 566 528	668 995 600
25.	Sulawesi Tengah	521 910 355	562 092 462	701 889 829	740 163 320
26.	Sulawesi Selatan	677 865 697	810 026 105	894 934 381	907 819 124
27.	Sulawesi Tenggara	477 736 202	516 641 000	657 211 240	728 363 000
28.	Gorontalo	406 259 368	308 900 309	413 118 212	457 524 910
29.	Sulawesi Barat	283 882 465	304 795 787	432 964 939	483 913 510
30.	M a l u k u	477 886 900	535 176 984	648 432 736	726 010 990
31.	Maluku Utara	399 978 448	487 298 936	571 207 517	611 729 245
32.	P a p u a	1 192 188 830	2 043 981 643	1 436 993 483	1 566 891 000
33.	Papua Barat	527 046 422	654 568 461	856 776 413	1 097 780 000
JUMLAH/TOTAL		33 654 398 517	36 513 742 961	42 992 798 385	43 705 801 798

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.1

REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMDA PROVINSI
SELURUH INDONESIA
ACTUAL REVENUE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT TAX SHARE
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	120 084 184	139 140 772	272 366 381	184 902 812
2.	Sumatera Utara	240 832 727	291 470 533	306 252 063	316 000 000
3.	Sumatera Barat	71 452 737	84 268 343	85 861 993	89 206 490
4.	R i a u	328 546 801	388 940 568	395 716 641	395 074 378
5.	J a m b i	128 281 061	146 944 369	130 385 477	129 185 696
6.	Sumatera Selatan	253 337 292	312 849 999	294 438 302	344 722 388
7.	Bengkulu	7 488 738	38 939 011	37 604 403	40 844 095
8.	Lampung	78 287 508	94 248 257	91 339 873	105 934 330
9.	Bangka Belitung	24 467 423	33 012 009	41 571 829	40 345 840
10.	Kepulauan Riau	124 792 905	159 814 588	174 674 004	185 871 207
11.	DKI Jakarta	5 533 851 713	7 004 187 865	8 526 794 673	9 300 000 000
12.	Jawa Barat	601 796 182	792 929 158	906 558 068	733 152 541
13.	Jawa Tengah	291 714 804	361 564 930	443 381 492	538 274 117
14.	D I Yogyakarta	40 377 303	43 543 835	70 549 425	61 043 321
15.	Jawa Timur	529 628 905	641 893 165	775 290 376	721 521 516
16.	Banten	219 851 656	273 756 916	324 786 786	297 161 080
17.	B a l i	67 808 574	88 771 234	115 383 052	87 127 240
18.	Nusa Tenggara Barat	49 121 165	57 342 362	59 770 703	82 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	48 562 402	54 686 738	53 762 651	61 068 940
20.	Kalimantan Barat	74 546 267	89 051 537	94 135 838	95 783 328
21.	Kalimantan Tengah	88 646 309	110 996 687	108 900 477	213 440 730
22.	Kalimantan Selatan	100 918 609	108 149 996	114 685 226	118 500 000
23.	Kalimantan Timur	513 380 594	588 794 319	548 180 146	515 888 102
24.	Sulawesi Utara	36 737 091	48 336 199	51 658 171	56 516 390
25.	Sulawesi Tengah	41 372 066	56 292 949	52 187 114	49 383 430
26.	Sulawesi Selatan	150 047 282	169 232 074	177 167 583	181 192 382
27.	Sulawesi Tenggara	43 079 986	45 195 265	50 637 799	68 080 402
28.	Gorontalo	14 683 205	16 658 938	18 679 714	17 029 150
29.	Sulawesi Barat	18 479 769	24 829 420	20 304 273	26 241 058
30.	M a l u k u	48 625 067	56 355 571	56 952 774	71 957 750
31.	Maluku Utara	43 343 061	40 914 565	50 520 990	46 100 752
32.	P a p u a	191 712 117	209 648 403	198 461 592	216 515 805
33.	Papua Barat	155 005 422	148 744 071	175 669 065	336 997 098
JUMLAH/TOTAL		10 280 860 925	12 721 504 646	14 824 628 954	15 727 062 368

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.2

REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMDA PROVINSI
SELURUH INDONESIA
ACTUAL REVENUE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT NON TAX SHARE/NATURAL RESOURCES
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 731 806 333	1 177 848 131	1 765 016 546	1 465 279 961
2.	Sumatera Utara	2 291 985	2 253 765	4 887 241	1 367 000
3.	Sumatera Barat	5 750 148	3 265 350	1 981 379	1 294 440
4.	R i a u	2 068 360 658	1 469 345 717	2 093 271 986	1 793 775 622
5.	J a m b i	122 432 047	124 594 278	122 217 742	131 640 935
6.	Sumatera Selatan	449 536 945	457 850 606	584 359 252	648 531 520
7.	Bengkulu	5 621 672	859 232	2 088 742	1 573 059
8.	Lampung	123 781 369	82 880 538	133 030 821	58 761 880
9.	Bangka Belitung	35 842 904	53 957 715	93 494 502	65 561 570
10.	Kepulauan Riau	546 679 310	169 192 001	480 931 786	295 378 808
11.	DKI Jakarta	213 197 563	128 893 818	176 018 721	240 000 000
12.	Jawa Barat	131 245 978	29 729 127	92 812 843	52 864 155
13.	Jawa Tengah	3 725 916	7 045 627	7 310 655	9 600 161
14.	D I Yogyakarta	21 229	0	11 348	8 710
15.	Jawa Timur	26 346 200	22 847 862	0	11 632 385
16.	Banten	231 778	3 450 169	1 023 419	500 190
17.	B a l i	481 556	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	22 579 320	29 452 942	18 721 992	33 054 550
19.	Nusa Tenggara Timur	151 039	52 631	57 683	146 410
20.	Kalimantan Barat	8 678 526	11 666 099	11 891 129	27 033 160
21.	Kalimantan Tengah	33 061 985	44 287 345	40 377 818	59 000 000
22.	Kalimantan Selatan	115 377 560	87 439 491	173 713 826	110 800 000
23.	Kalimantan Timur	2 879 936 912	2 271 914 884	3 375 771 283	2 562 567 753
24.	Sulawesi Utara	1 294 857	1 066 024	913 190	965 280
25.	Sulawesi Tengah	2 870 289	3 670 517	4 379 754	1 325 700
26.	Sulawesi Selatan	18 280 415	41 286 031	25 918 855	18 355 352
27.	Sulawesi Tenggara	8 302 216	9 604 735	10 272 059	14 120 598
28.	Gorontalo	186 163	847 371	426 502	824 500
29.	Sulawesi Barat	195 696	713 367	247 994	558 942
30.	M a l u k u	4 124 833	2 773 413	2 292 760	7 622 440
31.	Maluku Utara	18 030 703	50 660 371	32 723 068	47 826 833
32.	P a p u a	190 239 713	208 038 244	201 897 066	217 484 195
33.	Papua Barat	11 500 000	40 953 390	52 619 814	97 202 902
JUMLAH/TOTAL		8 782 163 818	6 538 440 791	9 510 681 776	7 976 659 011

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMDA PROVINSI
SELURUH INDONESIA
ACTUAL REVENUE OF GENERAL ALOCATION FUNDS
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

TABEL 3.2.3
TABLE

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	460 881 000	487 934 000	557 327 156	509 686 227
2.	Sumatera Utara	539 718 000	657 357 000	727 910 822	754 398 902
3.	Sumatera Barat	477 029 000	546 332 000	631 791 704	648 943 010
4.	R i a u	92 158 000	277 659 000	198 375 199	198 000 000
5.	J a m b i	374 361 000	415 018 000	468 803 682	473 505 880
6.	Sumatera Selatan	421 381 000	510 197 000	545 776 133	507 355 880
7.	Bengkulu	378 050 000	405 858 000	482 472 811	487 339 490
8.	Lampung	460 898 000	509 656 000	570 533 930	628 505 670
9.	Bangka Belitung	275 690 000	319 357 000	391 045 440	407 994 840
10.	Kepulauan Riau	178 330 990	333 332 994	288 884 858	403 132 480
11.	DKI Jakarta	773 024 100	119 943 000	0	0
12.	Jawa Barat	565 753 000	933 436 000	904 358 915	977 237 620
13.	Jawa Tengah	890 420 000	1 050 732 000	1 053 491 871	1 130 742 600
14.	D I Yogyakarta	402 484 000	437 379 000	511 773 394	523 919 950
15.	Jawa Timur	820 773 000	1 091 155 000	1 022 860 627	1 118 478 350
16.	Banten	245 294 000	330 597 000	342 743 861	361 179 090
17.	B a l i	353 306 000	436 533 000	448 187 419	448 187 420
18.	Nusa Tenggara Barat	404 145 000	447 658 000	511 286 478	608 611 960
19.	Nusa Tenggara Timur	479 436 000	553 589 000	616 601 854	616 601 800
20.	Kalimantan Barat	586 027 000	610 890 000	728 080 795	744 834 150
21.	Kalimantan Tengah	552 000 000	571 290 000	670 213 090	694 822 210
22.	Kalimantan Selatan	378 666 000	427 994 000	466 559 207	483 364 720
23.	Kalimantan Timur	72 548 000	235 743 000	126 235 249	63 114 430
24.	Sulawesi Utara	404 324 000	447 094 538	532 916 167	558 634 930
25.	Sulawesi Tengah	477 668 000	502 128 996	606 544 317	629 397 190
26.	Sulawesi Selatan	509 538 000	599 508 000	656 710 943	663 422 390
27.	Sulawesi Tenggara	426 354 000	461 841 000	566 435 382	589 844 000
28.	Gorontalo	391 390 000	291 394 000	368 637 996	388 325 260
29.	Sulawesi Barat	255 207 000	279 253 000	366 674 672	391 060 510
30.	M a l u k u	425 137 000	476 048 000	556 236 402	578 163 800
31.	Maluku Utara	338 604 684	370 724 000	451 481 459	458 511 660
32.	P a p u a	810 237 000	876 294 996	1 002 431 825	1 058 228 000
33.	Papua Barat	350 541 000	464 871 000	578 084 261	595 000 000
JUMLAH/TOTAL		14 571 373 774	16 478 797 524	17 951 467 919	18 700 544 419

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.4

REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMDA PROVINSI
SELURUH INDONESIA
ACTUAL REVENUE OF SPECIAL ALOCATION FUNDS
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	10 620 900	48 189 000
2.	Sumatera Utara	0	0	0	46 303 000
3.	Sumatera Barat	0	0	24 567 000	47 179 000
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	24 454 000	35 121 000
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	7 618 800	53 277 000
8.	Lampung	0	0	22 728 000	40 016 000
9.	Bangka Belitung	0	0	19 826 100	42 871 000
10.	Kepulauan Riau	0	0	5 801 000	20 931 000
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	0	0	0	0
13.	Jawa Tengah	0	0	0	3 436 000
14.	D I Yogyakarta	0	0	19 468 000	33 410 000
15.	Jawa Timur	0	0	0	18 001 000
16.	Banten	0	0	18 097 000	32 121 000
17.	B a l i	0	0	12 980 400	21 634 000
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	37 215 000	48 024 000
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	38 318 400	52 759 000
20.	Kalimantan Barat	0	0	31 095 419	53 314 000
21.	Kalimantan Tengah	0	0	40 179 000	59 296 000
22.	Kalimantan Selatan	0	0	36 039 000	43 352 000
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	28 079 000	52 879 000
25.	Sulawesi Tengah	0	0	38 778 644	60 057 000
26.	Sulawesi Selatan	0	0	35 137 000	44 849 000
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	29 866 000	56 318 000
28.	Gorontalo	0	0	25 374 000	51 346 000
29.	Sulawesi Barat	10 000 000	0	45 738 000	66 053 000
30.	M a l u k u	0	0	32 950 800	68 267 000
31.	Maluku Utara	0	25 000 000	36 482 000	59 290 000
32.	P a p u a	0	750 000 000	34 203 000	74 663 000
33.	Papua Barat	10 000 000	0	50 403 273	68 580 000
JUMLAH/TOTAL		20 000 000	775 000 000	706 019 736	1 301 536 000

*) Data APBD

TABEL 3.3
TABLE

REALISASI PENERIMAAN LAINNYA PEMDA PROVINSI
SELURUH INDONESIA
ACTUAL OTHER RECEIPTS OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 277 510 462	620 068 030	3 590 142 897	3 728 282 000
2.	Sumatera Utara	14 014 478	40 860 388	5 491 598	26 728 097
3.	Sumatera Barat	9 502 730	75 926 603	189 477 721	13 515 000
4.	R i a u	125 945 293	20 000 000	0	0
5.	J a m b i	0	17 743 055	64 410 340	25 049 200
6.	Sumatera Selatan	0	6 963 569	9 992 143	9 410 020
7.	Bengkulu	46 832	110 000 000	263 655 250	2 325 140
8.	Lampung	0	12 617 592	13 622 459	52 478 744
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	30 000 000	0	0
11.	DKI Jakarta	0	683 926 046	63 378 946	29 985 750
12.	Jawa Barat	0	30 477 736	96 225 804	9 594 281
13.	Jawa Tengah	1 985 970	11 364 864	387 113	0
14.	D I Yogyakarta	1 780 223	336 887 758	23 935 467	6 361 458
15.	Jawa Timur	23 235 984	19 901 336	64 635 094	193 952 154
16.	Banten	4 501 278	2 580 170	3 560 805	3 500 000
17.	B a l i	0	8 225 112	33 000 000	1 476 598
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	9 500 000	4 500 000
19.	Nusa Tenggara Timur	0	69 000 000	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	2 995 523	22 179 707	42 312 630
21.	Kalimantan Tengah	0	65 000 000	6 500 000	81 282 000
22.	Kalimantan Selatan	0	71 004 074	32 238 827	28 960 000
23.	Kalimantan Timur	184 560 000	21 365 200	7 023 939	281 200 000
24.	Sulawesi Utara	0	58 500 000	29 000 000	50 000 000
25.	Sulawesi Tengah	105 762	36 333 889	61 740 799	89 953 538
26.	Sulawesi Selatan	26 739 804	7 220 318	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	17 800 000	4 034 070	63 572 000
28.	Gorontalo	416 965	142 604 840	28 944 110	0
29.	Sulawesi Barat	6 285 125	13 915 935	15 938 862	26 228 819
30.	M a l u k u	1 264 710	271 706 070	17 860 920	32 500 000
31.	Maluku Utara	0	0	30 000 000	29 050 000
32.	P a p u a	3 488 284 000	3 508 748 000	3 962 342 897	3 409 796 000
33.	Papua Barat	0	0	569 500 000	1 718 460 000
JUMLAH/TOTAL		5 166 179 616	6 313 736 108	9 218 719 768	9 960 473 429

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.B

REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMDA PROVINSI
SELURUH INDONESIA
ACTUAL FINANCING RECEIPT OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 877 160 961	3 747 007 039	3 141 732 122	3 141 732 122
2.	Sumatera Utara	217 937 578	289 362 661	394 258 830	399 149 726
3.	Sumatera Barat	147 708 192	219 592 372	258 039 339	225 948 895
4.	R i a u	831 884 360	1 069 452 884	466 019 841	499 914 620
5.	J a m b i	280 698 822	310 525 175	359 487 858	386 301 605
6.	Sumatera Selatan	259 900 775	337 301 961	101 043 442	70 000 000
7.	Bengkulu	75 951 032	103 587 915	445 850 386	217 257 136
8.	Lampung	410 233 213	350 625 381	180 319 738	192 341 217
9.	Bangka Belitung	227 005 972	290 197 793	254 692 423	191 877 206
10.	Kepulauan Riau	261 061 149	447 501 470	184 315 626	310 000 000
11.	DKI Jakarta	3 107 087 921	2 020 596 204	1 364 256 321	1 746 000 000
12.	Jawa Barat	1 000 895 099	956 424 657	1 350 314 356	1 310 761 917
13.	Jawa Tengah	814 829 550	431 233 897	848 298 788	694 157 160
14.	D I Yogyakarta	189 400 980	210 869 773	537 060 364	206 829 744
15.	Jawa Timur	1 245 199 284	915 169 863	1 723 922 045	467 075 903
16.	Banten	352 917 848	157 157 181	149 104 130	159 198 104
17.	B a l i	256 422 410	178 282 654	282 503 094	258 329 975
18.	Nusa Tenggara Barat	75 990 834	65 133 785	71 073 304	85 662 695
19.	Nusa Tenggara Timur	294 705 889	348 582 927	310 377 666	122 199 375
20.	Kalimantan Barat	62 788 210	141 165 668	134 331 750	70 300 000
21.	Kalimantan Tengah	93 808 130	121 727 557	205 554 131	145 977 802
22.	Kalimantan Selatan	195 626 451	201 618 017	269 666 395	67 500 000
23.	Kalimantan Timur	1 999 681 766	3 083 537 760	2 361 237 901	750 000 000
24.	Sulawesi Utara	66 024 839	35 372 752	385 989 059	341 835 932
25.	Sulawesi Tengah	47 204 072	25 524 876	108 000 559	58 099 357
26.	Sulawesi Selatan	190 188 442	266 251 110	208 669 551	82 264 617
27.	Sulawesi Tenggara	36 325 654	62 761 318	61 603 700	158 364 000
28.	Gorontalo	6 485 870	73 948 507	128 731 650	154 134 197
29.	Sulawesi Barat	22 243 637	29 533 700	70 248 928	30 771 857
30.	M a l u k u	32 908 750	43 191 584	62 415 818	21 846 597
31.	Maluku Utara	0	22 159 758	26 220 676	50 000 000
32.	P a p u a	0	535 610 092	0	0
33.	Papua Barat	0	196 892 987	193 508 717	108 550 000
JUMLAH/TOTAL		14 680 277 690	17 287 901 278	16 638 848 508	12 724 381 759

*) Data APBD

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

TABEL 4
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	30 302 209 927	36 214 961 163	45 398 365 063	49 156 175 681
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	13 518 565 980	14 223 019 494	16 665 704 476	20 796 325 544
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	40 752 470	19 527 104	26 763 459	20 491 778
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4 086 810	91 223 065	60 269 587	128 740 078
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	1 193 527 142	639 577 595	5 386 368 439	2 932 285 684
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	2 623 849 064	4 459 757 107	4 670 816 005	4 036 240 392
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	9 456 509 218	9 948 389 701	10 596 170 314	11 251 717 723
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	2 985 534 108	6 587 767 357	7 785 211 795	9 355 388 657
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	479 385 135	245 699 740	207 060 988	634 985 825
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	34 483 611 934	39 726 141 320	43 212 462 677	57 030 812 189
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	3 267 634 010	5 427 444 661	5 372 239 813	6 473 356 212
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	13 052 752 803	14 732 776 642	18 943 346 819	24 538 538 617
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	18 163 225 121	19 565 920 017	18 896 876 045	26 018 917 360
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	19 271 169 015	19 282 226 675	24 726 272 483	2 743 203 929
JUMLAH/TOTAL		84 056 990 876	95 223 329 158	113 337 100 223	108 930 191 799

*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
TABEL 4.1 **PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENURUT JENIS PENGELUARAN**
TABLE **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT**
OF NANGROE ACEH DARUSSALAM BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 398 426 616	1 706 599 826	1 399 227 139	2 620 032 939
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	293 320 751	373 652 043	472 798 576	834 803 159
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	7 149 183
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	39 454 055	62 910 090	224 051 269	459 449 225
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	142 441 470	96 466 128	476 205 553	768 631 372
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	856 276 108	1 171 571 565	226 171 741	400 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	49 680 661	0	0	100 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	17 253 571	2 000 000	0	50 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	1 044 295 070	1 636 064 180	4 316 396 527	7 171 311 183
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	68 234 346	194 831 287	167 960 961	296 562 526
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	405 757 818	666 058 192	1 538 708 908	1 859 118 447
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	570 302 906	775 174 701	2 609 726 658	5 015 630 210
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	3 501 631 088	3 416 821 276	4 337 873 301	82 600 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 944 352 774	6 759 485 282	10 053 496 967	9 873 944 122

*) Data APBD

TABEL 4.2
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NORTH SUMATERA BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	1 141 191 439	1 352 300 997	1 794 384 366	2 211 036 036
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	397 105 569	449 293 517	559 784 809	750 945 524
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	2 350 000	31 816 251	247 062 083	115 820 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	58 701 881	145 597 060	117 761 735	147 362 677
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	503 891 118	534 340 347	683 336 924	719 453 144
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	173 899 877	191 253 822	186 095 993	418 554 691
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5 242 994	0	342 822	58 900 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	1 043 477 391	1 200 974 358	1 172 966 429	1 404 939 720
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	40 214 134	125 151 341	145 590 665	173 967 839
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	380 441 834	389 689 249	447 635 101	517 457 532
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	622 821 423	686 133 768	579 740 663	713 514 349
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	332 734 153	421 875 297	652 761 352	32 173 585
JUMLAH/TOTAL		2 517 402 983	2 975 150 652	3 620 112 147	3 648 149 341

*) Data APBD

TABEL 4.3
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST SUMATERA BY KIND OF EXPENDITURE

2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	473 347 800	663 942 984	906 350 514	784 227 252
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	259 153 610	308 429 943	367 200 832	429 627 396
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	7 735 933	0	24 627 500	13 670 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	26 568 615	54 987 396	35 067 065	25 324 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	159 000 112	177 336 285	229 537 664	254 152 110
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	18 095 520	123 189 360	249 798 708	57 104 443
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 794 010	0	118 745	4 349 303
B.	BELANJA LANGSUNG	486 741 857	577 432 399	731 349 975	923 465 352
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	26 375 304	76 255 217	55 511 523	67 368 083
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	211 989 645	241 915 958	313 735 522	424 773 658
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	248 376 908	259 261 224	362 102 930	431 323 611
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	246 282 693	259 616 802	344 106 415	42 151 807
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 206 372 350	1 500 992 185	1 981 806 904	1 749 844 411

*) Data APBD

TABEL 4.4
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI R I A U MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF R I A U BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	1 124 359 639	1 280 725 763	1 461 090 879	1 661 011 659
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	539 720 723	479 120 701	494 528 836	634 304 766
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	9 647 815	14 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	121 328 816	0	210 432 870	173 000 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	178 114 586	397 377 554	285 311 665	271 458 996
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	241 504 410	367 889 043	378 069 861	500 670 590
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	33 942 840	35 160 000	65 835 387	52 577 307
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	9 748 264	1 178 465	17 264 445	15 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	2 046 737 108	2 446 039 350	2 196 798 941	2 345 105 217
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	143 766 806	389 133 573	401 647 794	333 186 678
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	495 316 699	548 180 812	599 884 464	805 838 552
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 407 653 603	1 508 724 965	1 195 266 683	1 206 079 987
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 240 466 655	755 697 471	973 073 220	156 900 450
JUMLAH/TOTAL		4 411 563 402	4 482 462 584	4 630 963 040	4 163 017 326

*) Data APBD

TABEL 4.5
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF JAMBI BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	300 037 903	326 833 775	511 724 076	737 027 472
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	156 235 881	188 771 065	296 561 580	353 647 215
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	5 984 070	8 950 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	4 450 288	0	3 592 607	7 500 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	509 472	3 248 723	3 282 617	26 040 209
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	136 562 362	125 190 162	198 770 202	174 953 645
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	2 119 900	6 501 500	3 250 000	155 936 403
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	160 000	3 122 325	283 000	10 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	663 200 977	778 554 114	893 258 408	933 020 834
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	16 921 125	67 965 030	54 733 496	58 789 881
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	229 481 162	288 147 111	278 270 196	390 304 235
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	416 798 690	422 441 973	560 254 716	483 926 718
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	327 576 882	360 487 860	390 886 774	8 924 000
JUMLAH/TOTAL		1 290 815 762	1 465 875 749	1 795 869 258	1 678 972 306

*) Data APBD

TABEL 4.6
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTH SUMATERA BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	647 652 735	840 169 232	1 015 553 590	1 213 428 892
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	283 421 602	301 930 497	395 276 818	468 814 264
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	3 241 932	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	10 739 384	1 432 632	177 447 526	53 000 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	44 761 510	93 188 706	70 341 184	61 013 530
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	0	372 611 646	313 837 427	473 838 828
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	300 896 689	67 320 000	57 320 000	152 342 098
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 591 618	3 685 751	1 330 635	4 420 172
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	1 093 934 464	1 479 062 444	1 371 235 221	1 538 243 427
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	29 493 132	132 193 602	154 123 673	502 895 093
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	217 446 367	362 589 073	325 529 562	398 794 641
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	846 994 965	984 279 769	891 581 986	636 553 693
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	384 526 306	153 885 330	288 684 451	0
JUMLAH/TOTAL		2 126 113 505	2 473 117 006	2 675 473 262	2 751 672 319

*) Data APBD

TABEL 4.7
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BENGKULU BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	205 133 918	275 539 290	316 885 817	520 001 519
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	138 983 281	186 618 381	216 218 077	358 890 856
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	170	0	11 327 426	10 000 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	782 138	0	1 579 000	35 651 570
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	46 230 942	20 086 809	13 989 636	6 790 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	7 088 775	54 585 150	66 125 836	95 517 793
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1 989 696	2 249 730	1 000 000	7 901 300
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	10 058 916	11 999 220	6 645 842	5 250 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	299 740 344	389 220 857	932 780 371	337 590 888
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	16 976 517	53 737 939	53 699 610	46 292 300
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	156 797 748	145 768 307	490 766 233	156 373 865
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	125 966 079	189 714 611	388 314 528	134 924 723
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	127 384 801	204 250 385	278 702 464	366 754 851
JUMLAH/TOTAL		632 259 063	869 010 532	1 528 368 652	1 224 347 258

*) Data APBD

TABEL 4.8
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF LAMPUNG BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	744 321 160	766 700 354	1 062 018 773	1 060 793 371
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	240 080 143	256 249 309	343 068 313	418 928 652
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	27 453 845	144 369 023	35 419 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	143 971 514	96 907 332	137 112 682	123 441 667
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	347 855 666	380 089 868	415 383 957	416 530 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	7 790 923	6 000 000	3 000 000	23 633 333
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 622 914	0	19 084 798	42 840 719
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	596 735 505	748 559 857	648 996 390	829 331 183
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	48 909 055	109 074 104	77 346 004	79 785 684
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	221 318 598	369 676 218	362 818 709	512 830 676
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	326 507 852	269 809 535	208 831 677	236 714 823
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	364 125 381	209 461 217	192 341 218	0
JUMLAH/TOTAL		1 705 182 046	1 724 721 428	1 903 356 381	1 890 124 554

*) Data APBD

TABEL 4.9
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	238 813 954	275 710 418	374 850 548	470 312 673
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	60 707 612	72 175 270	103 493 088	146 870 753
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	273 584	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	750 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	30 812 297	4 738 539	101 747 894	141 383 614
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	18 292 841	73 634 872	45 847 668	29 691 200
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	81 606 202	91 861 990	102 097 456	123 510 190
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	46 187 440	31 137 571	21 664 442	24 149 143
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	933 978	2 162 176	0	3 957 773
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	224 567 864	318 067 952	400 498 444	531 601 025
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	3 999 323	41 500 824	59 478 732	43 078 222
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	66 614 952	82 057 721	105 828 477	141 302 876
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	153 953 589	194 509 407	235 191 235	347 219 927
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	297 797 793	306 288 047	319 465 870	2 000 000
JUMLAH/TOTAL		761 179 611	900 066 417	1 094 814 862	1 003 913 698

*) Data APBD

TABEL 4.10
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF RIAU ISLANDS BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	349 993 823	330 658 546	378 063 178	460 301 967
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	132 180 748	105 107 196	129 074 239	174 549 153
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	13 423 515	4 176 915	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	60 292 017	0	37 366 477	44 947 814
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	23 569 673	63 968 681	47 341 958	66 505 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	105 409 322	125 794 154	155 581 589	168 800 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	27 406 263	21 765 000	3 990 500	5 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 135 800	600 000	531 500	500 000
B.	BELANJA LANGSUNG	562 314 908	946 918 818	770 873 667	1 175 698 033
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	4 450 870	174 748 595	81 887 760	198 746 558
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	364 212 832	337 184 160	399 783 218	340 085 093
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	193 651 206	434 986 063	289 202 689	636 866 382
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	480 386 469	187 263 280	391 953 213	4 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 392 695 200	1 464 840 644	1 540 890 058	1 640 000 000

*) Data APBD

TABEL 4.11
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	5 161 132 609	6 174 903 183	6 201 068 273	6 742 209 966
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	4 852 091 962	5 500 795 828	5 676 127 360	6 260 717 654
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	30 333 767	18 825 036	14 998 360	9 946 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	51 434 854	0	177 020 390	289 757 329
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	58 426 032	95 372 565	329 840 768	65 064 553
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	126 304 443	421 053 789	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	41 547 082	137 722 280	0	0
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	994 469	1 133 685	3 081 395	116 724 430
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	10 000 445 187	10 674 967 490	9 755 457 813	15 397 257 208
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 262 784 199	1 460 880 627	1 918 187 026	1 850 282 635
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	3 305 610 261	4 023 191 536	5 255 670 595	7 602 103 580
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	5 432 050 727	5 190 895 327	2 581 600 192	5 944 870 993
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	2 283 041 101	1 838 772 505	4 629 488 116	311 066 085
JUMLAH/TOTAL		17 444 618 897	18 688 643 178	20 586 014 202	22 450 533 259

*) Data APBD

TABEL 4.12
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST JAVA BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	3 238 140 943	3 898 928 424	4 543 594 281	5 388 574 794
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	760 462 303	714 125 564	870 783 080	1 083 681 568
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	208 505	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	64 743 944	20 450 000	16 050 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	76 661 980	343 638 896	295 623 566	100 306 241
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	122 724 240	239 227 482	242 238 519	326 735 980
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	1 258 573 471	1 347 805 025	1 777 489 318	1 842 907 238
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	958 184 733	1 172 469 823	1 336 996 213	1 928 893 767
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	61 325 711	16 917 690	13 585	90 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	1 669 597 306	1 442 848 042	1 567 365 516	2 874 003 652
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	340 366 071	261 363 145	269 672 718	384 125 697
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	698 599 050	820 793 985	943 386 901	1 566 111 018
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	630 632 185	360 690 912	354 305 897	923 766 937
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 140 356 061	1 622 888 908	2 514 361 693	167 907
JUMLAH/TOTAL		6 048 094 310	6 964 665 374	8 625 321 490	8 262 746 353

*) Data APBD

TABEL 4.13
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL JAVA BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	2 156 977 594	2 452 531 172	3 360 057 527	3 525 877 766
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 213 837 542	730 704 564	876 807 193	1 138 690 727
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	136 632	1 650	331	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	26 111 160	2 623 590	385 489 980	69 820 303
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	247 372 010	352 270 701	412 423 156	431 545 754
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	532 088 623	865 593 447	1 058 172 720	1 123 798 129
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	111 053 627	501 337 220	626 139 791	737 022 853
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	26 378 000	0	1 024 356	25 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	1 590 666 496	1 446 782 194	1 802 604 949	2 166 734 610
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	179 316 526	262 242 181	250 055 680	242 916 811
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	776 048 688	811 302 913	1 022 442 666	1 335 571 106
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	635 301 282	373 237 100	530 106 603	588 246 693
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	885 653 420	895 433 125	889 050 921	341 937 835
JUMLAH/TOTAL		4 633 297 510	4 794 746 491	6 051 713 397	6 034 550 211

*) Data APBD

TABEL 4.14
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE

2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	612 328 879	588 036 426	915 745 609	724 456 346
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	234 893 501	250 848 301	295 501 942	314 281 099
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	64 028	54 966	45 778
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	50 060 048	0	293 366 860	9 259 164
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	3 249 338	58 957 258	77 120 813	102 955 463
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	169 579 842	161 429 340	201 741 159	201 426 442
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	3 449 857	80 374 500	46 900 000	79 488 400
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	151 096 293	36 362 999	1 059 869	17 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	238 301 369	389 957 809	537 540 673	687 592 639
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	19 518 207	62 013 000	77 683 468	92 970 298
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	124 035 643	223 723 942	268 023 479	388 547 579
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	94 747 519	104 220 867	191 833 726	206 074 762
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	219 915 582	539 576 751	342 384 028	16 375 000
JUMLAH/TOTAL		1 070 545 830	1 517 570 986	1 795 670 310	1 428 423 985

*) Data APBD

TABEL 4.15
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF EAST JAVA BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	2 417 365 677	3 072 886 614	4 322 174 904	3 762 038 157
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	641 156 212	852 296 554	986 157 099	1 383 445 734
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	4 000 000	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	7 424 126	2 000 000	1 283 926 009	531 379 418
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	107 631 971	854 686 635	559 004 250	91 607 764
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	1 389 540 714	1 334 276 267	1 452 594 469	1 362 714 955
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	242 809 736	4 624 715	16 689 728	379 630 700
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	24 802 918	25 002 443	23 803 349	13 259 586
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	2 709 178 923	2 194 958 730	1 881 485 690	2 552 017 591
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	378 004 661	358 504 881	21 201 965	447 872 240
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 529 326 834	1 194 352 556	1 311 774 043	1 662 440 141
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	801 847 428	642 101 293	548 509 682	441 705 210
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 221 922 350	1 587 372 539	2 595 366 864	103 592 000
JUMLAH/TOTAL		6 348 466 950	6 855 217 883	8 799 027 458	6 417 647 748

*) Data APBD

TABEL 4.16
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BANTEN BY KIND OF EXPENDITURE*

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	889 439 452	953 339 079	1 165 236 019	1 135 895 696
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	118 888 320	197 194 644	239 413 280	304 762 717
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	15 062 779	16 000 000	86 405 822	61 591 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	54 600 219	53 635 137	36 219 525	39 356 250
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	541 262 248	501 959 298	592 012 917	575 185 729
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	158 022 280	184 550 000	208 700 000	150 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 603 606	0	2 484 475	5 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	922 684 427	913 888 984	1 088 746 693	1 230 719 768
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	12 521 208	145 863 556	138 702 929	108 070 778
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	445 114 854	323 137 863	356 095 626	462 842 148
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	465 048 365	444 887 565	593 948 138	659 806 842
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	128 695 962	198 769 649	246 501 923	13 500 000
JUMLAH/TOTAL		1 940 819 841	2 065 997 712	2 500 484 635	2 380 115 464

*) Data APBD

TABEL 4.17
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BALI BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	765 920 737	824 759 506	1 024 532 462	1 125 781 450
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	250 271 342	317 882 473	377 193 055	428 558 077
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1 231 695	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	3 451 800	3 300 000	4 569 508
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	27 020 387	100 660 752	117 265 529	16 738 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	82 918 308	15 101 002	152 013 312	320 684 300
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	267 134 635	263 413 289	289 079 348	275 518 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	135 788 730	124 250 190	85 650 114	69 713 565
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 555 640	0	31 104	10 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	449 553 363	434 449 087	439 693 880	518 191 627
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	32 459 058	44 006 786	40 754 468	45 469 079
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	187 619 351	246 162 309	276 840 973	315 731 109
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	229 474 954	144 279 992	122 098 439	156 991 439
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	191 882 600	287 078 462	485 619 400	23 900 000
JUMLAH/TOTAL		1 407 356 700	1 546 287 055	1 949 845 742	1 667 873 077

*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN
 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
 OF WEST NUSA TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE
 2006 - 2009
 (000 rupiah)

TABEL 4.18
 TABLE

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	321 569 672	378 668 750	593 847 410	849 335 156
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	169 962 442	232 098 401	284 952 928	420 047 007
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	5 089 481	8 902 900	6 403 200
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	3 163 155	0	55 103 227	35 994 864
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	53 581 242	43 990 391	110 313 355	86 825 531
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	62 544 566	70 572 317	118 225 000	164 138 371
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	24 250 000	26 640 000	16 300 000	130 426 183
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	8 068 267	278 160	50 000	5 500 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	409 921 989	473 834 994	449 099 055	414 118 295
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	60 169 754	146 734 308	58 036 638	62 758 191
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	199 653 404	172 965 319	217 322 931	209 609 910
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	150 098 831	154 135 367	173 739 486	141 750 194
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	85 370 042	75 836 549	94 843 371	66 610 000
JUMLAH/TOTAL		816 861 703	928 340 293	1 137 789 836	1 330 063 451

*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN
TABEL 4.19 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT*
TABLE *OF EAST NUSA TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE*
 2006 - 2009
 (000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	299 230 479	336 055 202	485 652 667	530 065 465
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	158 801 873	175 961 637	228 667 698	347 763 137
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	7 492	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	19 359 483	0	93 264 088	5 025 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	6 387 993	33 199 082	52 224 987	46 641 893
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	324 021	45 836 797	50 060 997	62 210 698
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	98 046 346	75 498 153	53 276 974	57 424 737
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	16 303 271	5 559 533	8 157 923	11 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	338 060 789	574 177 339	498 580 794	496 557 910
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	30 300 377	56 831 008	56 200 520	45 564 709
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	178 113 895	223 496 043	239 658 532	282 838 037
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	129 646 517	293 850 288	202 721 742	168 155 164
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	361 515 892	313 975 090	272 170 957	50 000 000
JUMLAH/TOTAL		998 807 160	1 224 207 631	1 256 404 418	1 076 623 375

*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN
TABEL 4.20 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT*
OF WEST KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE
 2006 - 2009
 (000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	393 629 184	529 325 414	561 627 303	759 261 511
	<i>INDIRECT EXPENDITURE</i>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	202 369 420	239 596 848	287 833 932	374 959 353
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	277 365	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 348 426	0	750 000	32 762 500
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	118 242 025	66 279 882	27 245 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	117 396 871	144 076 248	166 939 489	218 337 673
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	69 275 491	26 106 000	39 824 000	102 706 985
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 961 611	1 304 293	0	3 250 000
B.	BELANJA LANGSUNG	559 068 627	606 930 868	799 332 607	768 904 632
	<i>DIRECT EXPENDITURE</i>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	15 577 765	71 151 108	61 463 897	74 977 923
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	253 608 317	265 111 955	327 122 350	419 364 316
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	289 882 545	270 667 805	410 746 360	274 562 393
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	157 188 493	190 839 755	247 569 386	20 300 000
	<i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>				
JUMLAH/TOTAL		1 109 886 304	1 327 096 037	1 608 529 296	1 548 466 143

*) Data APBD

TABEL 4.21
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	262 960 344	333 362 091	421 228 751	671 299 934
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	137 224 469	167 667 834	217 159 593	270 081 654
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	1 882 052	22 575 300
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	0	0	882 000	69 685 350
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	41 330 634	41 543 262	80 595 836
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	75 719 308	109 628 852	133 960 232	207 206 952
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	47 811 850	13 498 474	25 769 815	15 250 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 204 717	1 236 297	31 797	5 904 842
B.	BELANJA LANGSUNG	577 552 853	645 266 743	855 132 640	1 027 840 608
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	14 606 083	45 415 721	52 027 335	62 899 732
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	157 190 273	156 737 652	229 465 902	325 897 796
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	405 756 497	443 113 370	573 639 403	639 043 080
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	142 754 456	207 853 028	176 028 684	19 803 200
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		983 267 653	1 186 481 862	1 452 390 075	1 718 943 742

*) Data APBD

TABEL 4.22
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTH KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	543 390 092	471 509 593	765 453 382	802 985 497
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	217 450 475	133 873 320	317 010 588	364 636 000
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	42 770	240 105	64 106	100 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	0	0	210 000	25 319 600
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	27 140 220	63 371 903	91 521 188	76 409 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	259 894 883	253 471 947	344 000 000	300 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	37 461 744	12 400 000	10 500 000	32 720 897
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 400 000	8 152 318	2 147 500	3 800 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	587 468 553	806 749 969	780 240 584	825 181 223
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	22 336 543	209 712 555	95 360 699	73 941 903
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	202 668 510	229 420 455	282 988 393	359 986 638
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	362 463 500	367 616 959	401 891 492	391 252 682
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	244 761 974	308 436 987	599 769 551	77 798 000
JUMLAH/TOTAL		1 375 620 619	1 586 696 549	2 145 463 517	1 705 964 720

*) Data APBD

TABEL 4.23
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF EAST KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	1 657 923 745	1 987 229 040	3 804 877 592	2 660 904 287
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	184 428 387	208 204 906	293 393 854	628 657 467
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	81 287	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	42 290 000	1 173 155 948	294 631 750
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	261 801 902	124 691 200	156 145 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	1 473 414 071	340 274 972	715 981 590	533 356 378
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	1 128 157 260	1 496 655 000	1 043 113 692
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	6 500 000	1 000 000	5 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	2 110 862 576	2 706 010 413	2 551 506 899	2 768 378 938
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	205 537 068	242 903 051	342 289 063	236 213 142
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	380 079 752	413 693 592	554 858 140	801 670 216
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 525 245 756	2 049 413 770	1 654 359 696	1 730 495 580
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	3 078 316 467	2 889 832 431	2 132 356 631	332 000 000
JUMLAH/TOTAL		6 847 102 788	7 583 071 884	8 488 741 122	5 761 283 225

*) Data APBD

TABEL 4.24
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NORTH SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	386 911 713	389 796 872	498 152 958	617 787 105
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	205 437 418	240 294 257	293 926 794	358 862 105
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	35 366	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	33 195 700	0	8 749 940	16 375 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	70 345 465	65 961 254	58 539 064	57 125 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	68 075 601	70 569 181	107 099 262	167 925 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	6 785 000	10 000 000	29 500 000	10 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 037 163	2 972 180	337 898	7 500 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	262 846 459	384 854 504	415 829 754	502 664 444
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	30 727 453	60 006 967	73 784 960	49 617 565
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	120 059 294	186 647 334	184 703 131	210 101 795
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	112 059 712	138 200 203	157 341 663	242 945 084
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	69 859 113	68 042 372	437 153 668	250 100 000
JUMLAH/TOTAL		719 617 285	842 693 748	1 351 136 380	1 370 551 549

*) Data APBD

TABEL 4.25
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	326 222 473	330 804 263	414 235 264	463 623 230
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	186 800 509	184 531 441	225 128 671	287 632 592
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	42 920	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	9 385 432	700 000	34 289 279	36 041 412
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	47 631 349	47 394 317	33 138 731	10 896 385
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	58 039 274	58 489 313	80 057 810	80 422 841
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	24 192 989	39 287 386	41 620 773	43 630 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	130 000	401 806	0	5 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	326 709 495	370 821 974	540 498 372	636 051 993
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	24 732 846	58 675 797	48 331 512	59 307 275
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	159 919 607	192 627 988	289 497 279	293 111 600
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	142 057 042	119 518 189	202 669 581	283 633 118
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	76 797 121	116 515 559	195 751 546	22 883 612
JUMLAH/TOTAL		729 729 089	818 141 796	1 150 485 182	1 122 558 835

*) Data APBD

TABEL 4.26
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTH SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	768 576 855	1 046 425 572	1 322 638 511	1 423 149 429
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	321 126 077	324 239 125	413 690 300	515 425 105
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	806 495	396 285	318 270	400 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	0	0	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	125 999 723	151 586 443	88 728 562
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	265 250 709	353 125 985	423 728 417	499 766 762
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	164 483 843	239 418 358	329 563 873	303 829 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	16 909 731	3 246 096	3 751 208	15 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	623 764 418	787 341 698	811 882 058	865 319 020
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	37 519 665	102 663 738	101 518 645	122 926 700
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	270 639 263	363 593 280	435 182 478	451 134 231
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	315 605 490	321 084 680	275 180 935	291 258 089
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	277 962 216	241 982 727	207 773 765	3 261 400
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 670 303 489	2 075 749 997	2 342 294 334	2 291 729 849

*) Data APBD

TABEL 4.27
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF SOUTHEAST SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	203 921 733	287 754 917	448 772 298	683 666 000
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	147 549 024	187 429 842	221 936 814	377 044 000
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	32 490	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	1 419 890	0	22 973 208	8 639 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	11 048 117	25 397 550	19 347 164	9 315 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	31 759 212	51 297 525	71 578 547	62 182 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	10 920 000	18 630 000	108 046 245	221 486 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 193 000	5 000 000	4 890 320	5 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	357 276 559	471 306 142	450 469 558	727 325 000
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	33 602 815	75 393 378	77 721 452	111 541 000
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	135 476 597	182 174 767	222 612 223	263 434 000
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	188 197 147	213 737 997	150 135 883	352 350 000
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	73 496 318	13 000 000	120 210 611	12 300 000
JUMLAH/TOTAL		634 694 610	772 061 059	1 019 452 467	1 423 291 000

*) Data APBD

TABEL 4.28
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF GORONTALO BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	132 445 579	128 104 001	184 400 161	209 294 011
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	79 738 521	87 875 483	117 136 581	150 952 011
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4 086 810	2 526 987	3 731 875	2 652 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	17 245 789	3 213 000	14 500 850	8 500 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	29 942 069	4 709 933	5 701 080	2 700 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	0	19 401 357	33 587 580	35 690 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	10 177 241	9 692 195	6 300 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 432 390	200 000	50 000	2 500 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	264 156 779	331 135 655	352 771 575	325 210 899
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	31 166 905	49 462 297	27 651 146	23 901 168
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	79 378 521	118 824 649	168 193 654	201 759 691
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	153 611 353	162 848 709	156 926 775	99 550 040
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	70 675 056	136 291 515	128 134 197	154 134 197
JUMLAH/TOTAL		467 277 414	595 531 171	665 305 933	688 639 107

*) Data APBD

TABEL 4.29
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	81 759 700	62 560 480	107 876 721	117 722 702
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	30 461 215	37 248 317	52 339 830	75 913 702
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	0	6 799 363	6 361 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	24 085 915	22 480 763	12 265 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	51 048 485	0	21 067 000	19 183 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	1 144 000	817 400	0
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	250 000	82 248	4 372 365	4 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	192 023 417	283 519 836	412 313 051	486 191 484
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	16 494 189	46 103 176	56 256 109	55 865 851
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	100 648 153	144 652 039	146 120 254	199 642 603
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	74 881 075	92 764 621	209 936 688	230 683 030
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	74 018 347	49 221 605	60 818 581	1 000 000
JUMLAH/TOTAL		347 801 464	395 301 921	581 008 353	604 914 186

*) Data APBD

TABEL 4.30
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENGELUARAN
*ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF MALUKU BY KIND OF EXPENDITURE*
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	198 435 228	262 312 395	366 660 508	434 210 545
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	129 286 128	156 270 777	206 599 327	265 263 998
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	1 987 338	2 193 960	43 751 887
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 811 673	100 000	58 587 876	26 484 530
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	7 411 959	40 132 707	39 290 454	32 885 470
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	12 047 220	34 940 217	34 803 544	41 769 500
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	27 589 108	0	3 000 000	2 555 160
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	20 289 140	28 881 356	22 185 347	21 500 000
B.	BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	342 780 472	374 365 554	413 984 128	497 607 231
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	13 850 482	43 608 792	52 043 712	83 124 345
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	161 358 380	181 297 774	212 297 387	293 349 592
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	167 571 610	149 458 988	149 643 029	121 133 294
C.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	49 924 830	317 843 166	68 106 192	6 265 000
JUMLAH/TOTAL		591 140 530	954 521 115	848 750 828	938 082 776

*) Data APBD

TABEL 4.31
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NORTH MALUKU BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	169 649 309	259 304 679	268 213 779	254 748 854
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	84 939 264	128 509 736	159 701 755	167 575 099
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	21 867 709	0	18 370 900	15 180 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	30 179 158	108 558 695	56 107 261	43 265 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	8 742 535	14 662 283	33 593 533	13 808 755
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	17 927 290	343 788	271 830	1 420 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5 993 353	7 230 177	168 500	13 500 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	257 686 004	273 416 865	377 283 949	501 160 555
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	11 797 100	22 236 248	39 221 245	56 755 306
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	133 223 904	154 217 386	158 556 450	172 141 936
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	112 665 000	96 963 231	179 506 254	272 263 313
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	22 159 759	33 844 962	57 268 676	15 500 000
JUMLAH/TOTAL		449 495 072	566 566 506	702 766 404	771 409 409

*) Data APBD

TABEL 4.32
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF PAPUA BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	2 527 627 185	3 363 238 238	3 813 102 046	3 152 352 000
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	641 175 865	381 472 053	563 203 073	591 910 000
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	542 271 610	0	5 630 000	5 675 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	942 965 694	586 322 635	534 314 520	368 717 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	248 574 411	73 242 042	90 127 829	96 843 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	77 725 815	2 251 710 986	2 537 008 414	2 039 878 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	74 913 790	70 490 522	82 818 210	49 329 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	1 390 393 235	2 190 858 190	1 937 565 080	1 989 733 000
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	84 160 014	190 004 280	206 297 330	311 382 000
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	590 163 760	482 551 226	682 075 010	776 980 000
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	716 069 461	1 518 302 684	1 049 192 740	901 371 000
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	977 038 240	879 663 012	6 411 009	180 000 000
JUMLAH/TOTAL		4 895 058 660	6 433 759 440	5 757 078 135	5 322 085 000

*) Data APBD

TABEL 4.33
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI
PROPINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
OF WEST PAPUA BY KIND OF EXPENDITURE
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	163 371 758	263 944 067	589 067 757	1 382 762 000
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	49 303 791	52 549 667	83 034 561	114 083 000
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	1 889 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	10 738 013	0	81 727 355	186 918 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	37 131 176	154 544 400	222 614 545	32 272 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	0	12 000 000	31 356 896	39 900 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	66 198 778	44 850 000	170 334 400	1 002 700 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	0	5 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	240 867 150	426 803 911	1 057 922 986	1 581 743 000
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	10 744 409	47 076 549	55 797 078	70 199 000
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	114 838 837	190 833 278	295 498 032	397 290 000
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	115 283 904	188 894 084	706 627 876	1 114 254 000
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	134 951 394	193 509 013	49 284 435	25 205 000
JUMLAH/TOTAL		539 190 302	884 256 991	1 696 275 178	2 989 710 000

*) Data APBD

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 398 426 616	1 706 599 826	1 399 227 139	2 620 032 939
2.	Sumatera Utara	1 141 191 439	1 352 300 997	1 794 384 366	2 211 036 036
3.	Sumatera Barat	473 347 800	663 942 984	906 350 514	784 227 252
4.	R i a u	1 124 359 639	1 280 725 763	1 461 090 879	1 661 011 659
5.	J a m b i	300 037 903	326 833 775	511 724 076	737 027 472
6.	Sumatera Selatan	647 652 735	840 169 232	1 015 553 590	1 213 428 892
7.	Bengkulu	205 133 918	275 539 290	316 885 817	520 001 519
8.	Lampung	744 321 160	766 700 354	1 062 018 773	1 060 793 371
9.	Bangka Belitung	238 813 954	275 710 418	374 850 548	470 312 673
10.	Kepulauan Riau	349 993 823	330 658 546	378 063 178	460 301 967
11.	DKI Jakarta	5 161 132 609	6 174 903 183	6 201 068 273	6 742 209 966
12.	Jawa Barat	3 238 140 943	3 898 928 424	4 543 594 281	5 388 574 794
13.	Jawa Tengah	2 156 977 594	2 452 531 172	3 360 057 527	3 525 877 766
14.	D I Yogyakarta	612 328 879	588 036 426	915 745 609	724 456 346
15.	Jawa Timur	2 417 365 677	3 072 886 614	4 322 174 904	3 762 038 157
16.	Banten	889 439 452	953 339 079	1 165 236 019	1 135 895 696
17.	B a l i	765 920 737	824 759 506	1 024 532 462	1 125 781 450
18.	Nusa Tenggara Barat	321 569 672	378 668 750	593 847 410	849 335 156
19.	Nusa Tenggara Timur	299 230 479	336 055 202	485 652 667	530 065 465
20.	Kalimantan Barat	393 629 184	529 325 414	561 627 303	759 261 511
21.	Kalimantan Tengah	262 960 344	333 362 091	421 228 751	671 299 934
22.	Kalimantan Selatan	543 390 092	471 509 593	765 453 382	802 985 497
23.	Kalimantan Timur	1 657 923 745	1 987 229 040	3 804 877 592	2 660 904 287
24.	Sulawesi Utara	386 911 713	389 796 872	498 152 958	617 787 105
25.	Sulawesi Tengah	326 222 473	330 804 263	414 235 264	463 623 230
26.	Sulawesi Selatan	768 576 855	1 046 425 572	1 322 638 511	1 423 149 429
27.	Sulawesi Tenggara	203 921 733	287 754 917	448 772 298	683 666 000
28.	Gorontalo	132 445 579	128 104 001	184 400 161	209 294 011
29.	Sulawesi Barat	81 759 700	62 560 480	107 876 721	117 722 702
30.	M a l u k u	198 435 228	262 312 395	366 660 508	434 210 545
31.	Maluku Utara	169 649 309	259 304 679	268 213 779	254 748 854
32.	P a p u a	2 527 627 185	3 363 238 238	3 813 102 046	3 152 352 000
33.	Papua Barat	163 371 758	263 944 067	589 067 757	1 382 762 000
JUMLAH/TOTAL		30 302 209 927	36 214 961 163	45 398 365 063	49 156 175 681

*) Data APBD

REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.1

SELURUH INDONESIA

TABLE ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT

THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	293 320 751	373 652 043	472 798 576	834 803 159
2.	Sumatera Utara	397 105 569	449 293 517	559 784 809	750 945 524
3.	Sumatera Barat	259 153 610	308 429 943	367 200 832	429 627 396
4.	R i a u	539 720 723	479 120 701	494 528 836	634 304 766
5.	J a m b i	156 235 881	188 771 065	296 561 580	353 647 215
6.	Sumatera Selatan	283 421 602	301 930 497	395 276 818	468 814 264
7.	Bengkulu	138 983 281	186 618 381	216 218 077	358 890 856
8.	Lampung	240 080 143	256 249 309	343 068 313	418 928 652
9.	Bangka Belitung	60 707 612	72 175 270	103 493 088	146 870 753
10.	Kepulauan Riau	132 180 748	105 107 196	129 074 239	174 549 153
11.	DKI Jakarta	4 852 091 962	5 500 795 828	5 676 127 360	6 260 717 654
12.	Jawa Barat	760 462 303	714 125 564	870 783 080	1 083 681 568
13.	Jawa Tengah	1 213 837 542	730 704 564	876 807 193	1 138 690 727
14.	D I Yogyakarta	234 893 501	250 848 301	295 501 942	314 281 099
15.	Jawa Timur	641 156 212	852 296 554	986 157 099	1 383 445 734
16.	Banten	118 888 320	197 194 644	239 413 280	304 762 717
17.	B a l i	250 271 342	317 882 473	377 193 055	428 558 077
18.	Nusa Tenggara Barat	169 962 442	232 098 401	284 952 928	420 047 007
19.	Nusa Tenggara Timur	158 801 873	175 961 637	228 667 698	347 763 137
20.	Kalimantan Barat	202 369 420	239 596 848	287 833 932	374 959 353
21.	Kalimantan Tengah	137 224 469	167 667 834	217 159 593	270 081 654
22.	Kalimantan Selatan	217 450 475	133 873 320	317 010 588	364 636 000
23.	Kalimantan Timur	184 428 387	208 204 906	293 393 854	628 657 467
24.	Sulawesi Utara	205 437 418	240 294 257	293 926 794	358 862 105
25.	Sulawesi Tengah	186 800 509	184 531 441	225 128 671	287 632 592
26.	Sulawesi Selatan	321 126 077	324 239 125	413 690 300	515 425 105
27.	Sulawesi Tenggara	147 549 024	187 429 842	221 936 814	377 044 000
28.	Gorontalo	79 738 521	87 875 483	117 136 581	150 952 011
29.	Sulawesi Barat	30 461 215	37 248 317	52 339 830	75 913 702
30.	M a l u k u	129 286 128	156 270 777	206 599 327	265 263 998
31.	Maluku Utara	84 939 264	128 509 736	159 701 755	167 575 099
32.	P a p u a	641 175 865	381 472 053	563 203 073	591 910 000
33.	Papua Barat	49 303 791	52 549 667	83 034 561	114 083 000
JUMLAH/TOTAL		13 518 565 980	14 223 019 494	16 665 704 476	20 796 325 544

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.2

SELURUH INDONESIA

TABLE

ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT

THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	3 241 932	0	0	0
7.	Bengkulu	170	0	11 327 426	10 000 000
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	273 584	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	30 333 767	18 825 036	14 998 360	9 946 000
12.	Jawa Barat	208 505	0	0	0
13.	Jawa Tengah	136 632	1 650	331	0
14.	D I Yogyakarta	0	64 028	54 966	45 778
15.	Jawa Timur	4 000 000	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	1 231 695	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	7 492	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	277 365	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	42 770	240 105	64 106	100 000
23.	Kalimantan Timur	81 287	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	35 366	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	42 920	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	806 495	396 285	318 270	400 000
27.	Sulawesi Tenggara	32 490	0	0	0
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	0	0	0	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	P a p u a	0	0	0	0
33.	Papua Barat	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		40 752 470	19 527 104	26 763 459	20 491 778

*) Data APBD

REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.3

SELURUH INDONESIA

TABLE

ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT

THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	7 149 183
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	9 647 815	14 000 000
5.	J a m b i	0	0	5 984 070	8 950 000
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	750 000
10.	Kepulauan Riau	0	13 423 515	4 176 915	0
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	0	64 743 944	20 450 000	16 050 000
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	3 451 800	3 300 000	4 569 508
18.	Nusa Tenggara Barat	0	5 089 481	8 902 900	6 403 200
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	1 882 052	22 575 300
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	4 086 810	2 526 987	3 731 875	2 652 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	0	1 987 338	2 193 960	43 751 887
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	P a p u a	0	0	0	0
33.	Papua Barat	0	0	0	1 889 000
JUMLAH/TOTAL		4 086 810	91 223 065	60 269 587	128 740 078

*) Data APBD

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.4
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	39 454 055	62 910 090	224 051 269	459 449 225
2.	Sumatera Utara	2 350 000	31 816 251	247 062 083	115 820 000
3.	Sumatera Barat	7 735 933	0	24 627 500	13 670 000
4.	R i a u	121 328 816	0	210 432 870	173 000 000
5.	J a m b i	4 450 288	0	3 592 607	7 500 000
6.	Sumatera Selatan	10 739 384	1 432 632	177 447 526	53 000 000
7.	Bengkulu	782 138	0	1 579 000	35 651 570
8.	Lampung	0	27 453 845	144 369 023	35 419 000
9.	Bangka Belitung	30 812 297	4 738 539	101 747 894	141 383 614
10.	Kepulauan Riau	60 292 017	0	37 366 477	44 947 814
11.	DKI Jakarta	51 434 854	0	177 020 390	289 757 329
12.	Jawa Barat	76 661 980	343 638 896	295 623 566	100 306 241
13.	Jawa Tengah	26 111 160	2 623 590	385 489 980	69 820 303
14.	D I Yogyakarta	50 060 048	0	293 366 860	9 259 164
15.	Jawa Timur	7 424 126	2 000 000	1 283 926 009	531 379 418
16.	Banten	15 062 779	16 000 000	86 405 822	61 591 000
17.	B a l i	27 020 387	100 660 752	117 265 529	16 738 000
18.	Nusa Tenggara Barat	3 163 155	0	55 103 227	35 994 864
19.	Nusa Tenggara Timur	19 359 483	0	93 264 088	5 025 000
20.	Kalimantan Barat	1 348 426	0	750 000	32 762 500
21.	Kalimantan Tengah	0	0	882 000	69 685 350
22.	Kalimantan Selatan	0	0	210 000	25 319 600
23.	Kalimantan Timur	0	42 290 000	1 173 155 948	294 631 750
24.	Sulawesi Utara	33 195 700	0	8 749 940	16 375 000
25.	Sulawesi Tengah	9 385 432	700 000	34 289 279	36 041 412
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	1 419 890	0	22 973 208	8 639 000
28.	Gorontalo	17 245 789	3 213 000	14 500 850	8 500 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	6 799 363	6 361 000
30.	M a l u k u	1 811 673	100 000	58 587 876	26 484 530
31.	Maluku Utara	21 867 709	0	18 370 900	15 180 000
32.	P a p u a	542 271 610	0	5 630 000	5 675 000
33.	Papua Barat	10 738 013	0	81 727 355	186 918 000
JUMLAH/TOTAL		1 193 527 142	639 577 595	5 386 368 439	2 932 285 684

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.5
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL SOCIAL AIDS EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	142 441 470	96 466 128	476 205 553	768 631 372
2.	Sumatera Utara	58 701 881	145 597 060	117 761 735	147 362 677
3.	Sumatera Barat	26 568 615	54 987 396	35 067 065	25 324 000
4.	R i a u	178 114 586	397 377 554	285 311 665	271 458 996
5.	J a m b i	509 472	3 248 723	3 282 617	26 040 209
6.	Sumatera Selatan	44 761 510	93 188 706	70 341 184	61 013 530
7.	Bengkulu	46 230 942	20 086 809	13 989 636	6 790 000
8.	Lampung	143 971 514	96 907 332	137 112 682	123 441 667
9.	Bangka Belitung	18 292 841	73 634 872	45 847 668	29 691 200
10.	Kepulauan Riau	23 569 673	63 968 681	47 341 958	66 505 000
11.	DKI Jakarta	58 426 032	95 372 565	329 840 768	65 064 553
12.	Jawa Barat	122 724 240	239 227 482	242 238 519	326 735 980
13.	Jawa Tengah	247 372 010	352 270 701	412 423 156	431 545 754
14.	D I Yogyakarta	3 249 338	58 957 258	77 120 813	102 955 463
15.	Jawa Timur	107 631 971	854 686 635	559 004 250	91 607 764
16.	Banten	54 600 219	53 635 137	36 219 525	39 356 250
17.	B a l i	82 918 308	15 101 002	152 013 312	320 684 300
18.	Nusa Tenggara Barat	53 581 242	43 990 391	110 313 355	86 825 531
19.	Nusa Tenggara Timur	6 387 993	33 199 082	52 224 987	46 641 893
20.	Kalimantan Barat	0	118 242 025	66 279 882	27 245 000
21.	Kalimantan Tengah	0	41 330 634	41 543 262	80 595 836
22.	Kalimantan Selatan	27 140 220	63 371 903	91 521 188	76 409 000
23.	Kalimantan Timur	0	261 801 902	124 691 200	156 145 000
24.	Sulawesi Utara	70 345 465	65 961 254	58 539 064	57 125 000
25.	Sulawesi Tengah	47 631 349	47 394 317	33 138 731	10 896 385
26.	Sulawesi Selatan	0	125 999 723	151 586 443	88 728 562
27.	Sulawesi Tenggara	11 048 117	25 397 550	19 347 164	9 315 000
28.	Gorontalo	29 942 069	4 709 933	5 701 080	2 700 000
29.	Sulawesi Barat	0	24 085 915	22 480 763	12 265 000
30.	M a l u k u	7 411 959	40 132 707	39 290 454	32 885 470
31.	Maluku Utara	30 179 158	108 558 695	56 107 261	43 265 000
32.	P a p u a	942 965 694	586 322 635	534 314 520	368 717 000
33.	Papua Barat	37 131 176	154 544 400	222 614 545	32 272 000
JUMLAH/TOTAL		2 623 849 064	4 459 757 107	4 670 816 005	4 036 240 392

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.6
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	856 276 108	1 171 571 565	226 171 741	400 000 000
2.	Sumatera Utara	503 891 118	534 340 347	683 336 924	719 453 144
3.	Sumatera Barat	159 000 112	177 336 285	229 537 664	254 152 110
4.	R i a u	241 504 410	367 889 043	378 069 861	500 670 590
5.	J a m b i	136 562 362	125 190 162	198 770 202	174 953 645
6.	Sumatera Selatan	0	372 611 646	313 837 427	473 838 828
7.	Bengkulu	7 088 775	54 585 150	66 125 836	95 517 793
8.	Lampung	347 855 666	380 089 868	415 383 957	416 530 000
9.	Bangka Belitung	81 606 202	91 861 990	102 097 456	123 510 190
10.	Kepulauan Riau	105 409 322	125 794 154	155 581 589	168 800 000
11.	DKI Jakarta	126 304 443	421 053 789	0	0
12.	Jawa Barat	1 258 573 471	1 347 805 025	1 777 489 318	1 842 907 238
13.	Jawa Tengah	532 088 623	865 593 447	1 058 172 720	1 123 798 129
14.	D I Yogyakarta	169 579 842	161 429 340	201 741 159	201 426 442
15.	Jawa Timur	1 389 540 714	1 334 276 267	1 452 594 469	1 362 714 955
16.	Banten	541 262 248	501 959 298	592 012 917	575 185 729
17.	B a l i	267 134 635	263 413 289	289 079 348	275 518 000
18.	Nusa Tenggara Barat	62 544 566	70 572 317	118 225 000	164 138 371
19.	Nusa Tenggara Timur	324 021	45 836 797	50 060 997	62 210 698
20.	Kalimantan Barat	117 396 871	144 076 248	166 939 489	218 337 673
21.	Kalimantan Tengah	75 719 308	109 628 852	133 960 232	207 206 952
22.	Kalimantan Selatan	259 894 883	253 471 947	344 000 000	300 000 000
23.	Kalimantan Timur	1 473 414 071	340 274 972	715 981 590	533 356 378
24.	Sulawesi Utara	68 075 601	70 569 181	107 099 262	167 925 000
25.	Sulawesi Tengah	58 039 274	58 489 313	80 057 810	80 422 841
26.	Sulawesi Selatan	265 250 709	353 125 985	423 728 417	499 766 762
27.	Sulawesi Tenggara	31 759 212	51 297 525	71 578 547	62 182 000
28.	Gorontalo	0	19 401 357	33 587 580	35 690 000
29.	Sulawesi Barat	51 048 485	0	21 067 000	19 183 000
30.	M a l u k u	12 047 220	34 940 217	34 803 544	41 769 500
31.	Maluku Utara	8 742 535	14 662 283	33 593 533	13 808 755
32.	P a p u a	248 574 411	73 242 042	90 127 829	96 843 000
33.	Papua Barat	0	12 000 000	31 356 896	39 900 000
JUMLAH/TOTAL		9 456 509 218	9 948 389 701	10 596 170 314	11 251 717 723

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.7
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL FINANCIAL AIDS EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	49 680 661	0	0	100 000 000
2.	Sumatera Utara	173 899 877	191 253 822	186 095 993	418 554 691
3.	Sumatera Barat	18 095 520	123 189 360	249 798 708	57 104 443
4.	R i a u	33 942 840	35 160 000	65 835 387	52 577 307
5.	J a m b i	2 119 900	6 501 500	3 250 000	155 936 403
6.	Sumatera Selatan	300 896 689	67 320 000	57 320 000	152 342 098
7.	Bengkulu	1 989 696	2 249 730	1 000 000	7 901 300
8.	Lampung	7 790 923	6 000 000	3 000 000	23 633 333
9.	Bangka Belitung	46 187 440	31 137 571	21 664 442	24 149 143
10.	Kepulauan Riau	27 406 263	21 765 000	3 990 500	5 000 000
11.	DKI Jakarta	41 547 082	137 722 280	0	0
12.	Jawa Barat	958 184 733	1 172 469 823	1 336 996 213	1 928 893 767
13.	Jawa Tengah	111 053 627	501 337 220	626 139 791	737 022 853
14.	D I Yogyakarta	3 449 857	80 374 500	46 900 000	79 488 400
15.	Jawa Timur	242 809 736	4 624 715	16 689 728	379 630 700
16.	Banten	158 022 280	184 550 000	208 700 000	150 000 000
17.	B a l i	135 788 730	124 250 190	85 650 114	69 713 565
18.	Nusa Tenggara Barat	24 250 000	26 640 000	16 300 000	130 426 183
19.	Nusa Tenggara Timur	98 046 346	75 498 153	53 276 974	57 424 737
20.	Kalimantan Barat	69 275 491	26 106 000	39 824 000	102 706 985
21.	Kalimantan Tengah	47 811 850	13 498 474	25 769 815	15 250 000
22.	Kalimantan Selatan	37 461 744	12 400 000	10 500 000	32 720 897
23.	Kalimantan Timur	0	1 128 157 260	1 496 655 000	1 043 113 692
24.	Sulawesi Utara	6 785 000	10 000 000	29 500 000	10 000 000
25.	Sulawesi Tengah	24 192 989	39 287 386	41 620 773	43 630 000
26.	Sulawesi Selatan	164 483 843	239 418 358	329 563 873	303 829 000
27.	Sulawesi Tenggara	10 920 000	18 630 000	108 046 245	221 486 000
28.	Gorontalo	0	10 177 241	9 692 195	6 300 000
29.	Sulawesi Barat	0	1 144 000	817 400	0
30.	M a l u k u	27 589 108	0	3 000 000	2 555 160
31.	Maluku Utara	17 927 290	343 788	271 830	1 420 000
32.	P a p u a	77 725 815	2 251 710 986	2 537 008 414	2 039 878 000
33.	Papua Barat	66 198 778	44 850 000	170 334 400	1 002 700 000
JUMLAH/TOTAL		2 985 534 108	6 587 767 357	7 785 211 795	9 355 388 657

*) Data APBD

REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.A.8

SELURUH INDONESIA

TABLE

ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT

THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	17 253 571	2 000 000	0	50 000 000
2.	Sumatera Utara	5 242 994	0	342 822	58 900 000
3.	Sumatera Barat	2 794 010	0	118 745	4 349 303
4.	R i a u	9 748 264	1 178 465	17 264 445	15 000 000
5.	J a m b i	160 000	3 122 325	283 000	10 000 000
6.	Sumatera Selatan	4 591 618	3 685 751	1 330 635	4 420 172
7.	Bengkulu	10 058 916	11 999 220	6 645 842	5 250 000
8.	Lampung	4 622 914	0	19 084 798	42 840 719
9.	Bangka Belitung	933 978	2 162 176	0	3 957 773
10.	Kepulauan Riau	1 135 800	600 000	531 500	500 000
11.	DKI Jakarta	994 469	1 133 685	3 081 395	116 724 430
12.	Jawa Barat	61 325 711	16 917 690	13 585	90 000 000
13.	Jawa Tengah	26 378 000	0	1 024 356	25 000 000
14.	D I Yogyakarta	151 096 293	36 362 999	1 059 869	17 000 000
15.	Jawa Timur	24 802 918	25 002 443	23 803 349	13 259 586
16.	Banten	1 603 606	0	2 484 475	5 000 000
17.	B a l i	1 555 640	0	31 104	10 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	8 068 267	278 160	50 000	5 500 000
19.	Nusa Tenggara Timur	16 303 271	5 559 533	8 157 923	11 000 000
20.	Kalimantan Barat	2 961 611	1 304 293	0	3 250 000
21.	Kalimantan Tengah	2 204 717	1 236 297	31 797	5 904 842
22.	Kalimantan Selatan	1 400 000	8 152 318	2 147 500	3 800 000
23.	Kalimantan Timur	0	6 500 000	1 000 000	5 000 000
24.	Sulawesi Utara	3 037 163	2 972 180	337 898	7 500 000
25.	Sulawesi Tengah	130 000	401 806	0	5 000 000
26.	Sulawesi Selatan	16 909 731	3 246 096	3 751 208	15 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	1 193 000	5 000 000	4 890 320	5 000 000
28.	Gorontalo	1 432 390	200 000	50 000	2 500 000
29.	Sulawesi Barat	250 000	82 248	4 372 365	4 000 000
30.	M a l u k u	20 289 140	28 881 356	22 185 347	21 500 000
31.	Maluku Utara	5 993 353	7 230 177	168 500	13 500 000
32.	P a p u a	74 913 790	70 490 522	82 818 210	49 329 000
33.	Papua Barat	0	0	0	5 000 000
JUMLAH/TOTAL		479 385 135	245 699 740	207 060 988	634 985 825

*) Data APBD

REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.B
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 044 295 070	1 636 064 180	4 316 396 527	7 171 311 183
2.	Sumatera Utara	1 043 477 391	1 200 974 358	1 172 966 429	1 404 939 720
3.	Sumatera Barat	486 741 857	577 432 399	731 349 975	923 465 352
4.	R i a u	2 046 737 108	2 446 039 350	2 196 798 941	2 345 105 217
5.	J a m b i	663 200 977	778 554 114	893 258 408	933 020 834
6.	Sumatera Selatan	1 093 934 464	1 479 062 444	1 371 235 221	1 538 243 427
7.	Bengkulu	299 740 344	389 220 857	932 780 371	337 590 888
8.	Lampung	596 735 505	748 559 857	648 996 390	829 331 183
9.	Bangka Belitung	224 567 864	318 067 952	400 498 444	531 601 025
10.	Kepulauan Riau	562 314 908	946 918 818	770 873 667	1 175 698 033
11.	DKI Jakarta	10 000 445 187	10 674 967 490	9 755 457 813	15 397 257 208
12.	Jawa Barat	1 669 597 306	1 442 848 042	1 567 365 516	2 874 003 652
13.	Jawa Tengah	1 590 666 496	1 446 782 194	1 802 604 949	2 166 734 610
14.	D I Yogyakarta	238 301 369	389 957 809	537 540 673	687 592 639
15.	Jawa Timur	2 709 178 923	2 194 958 730	1 881 485 690	2 552 017 591
16.	Banten	922 684 427	913 888 984	1 088 746 693	1 230 719 768
17.	B a l i	449 553 363	434 449 087	439 693 880	518 191 627
18.	Nusa Tenggara Barat	409 921 989	473 834 994	449 099 055	414 118 295
19.	Nusa Tenggara Timur	338 060 789	574 177 339	498 580 794	496 557 910
20.	Kalimantan Barat	559 068 627	606 930 868	799 332 607	768 904 632
21.	Kalimantan Tengah	577 552 853	645 266 743	855 132 640	1 027 840 608
22.	Kalimantan Selatan	587 468 553	806 749 969	780 240 584	825 181 223
23.	Kalimantan Timur	2 110 862 576	2 706 010 413	2 551 506 899	2 768 378 938
24.	Sulawesi Utara	262 846 459	384 854 504	415 829 754	502 664 444
25.	Sulawesi Tengah	326 709 495	370 821 974	540 498 372	636 051 993
26.	Sulawesi Selatan	623 764 418	787 341 698	811 882 058	865 319 020
27.	Sulawesi Tenggara	357 276 559	471 306 142	450 469 558	727 325 000
28.	Gorontalo	264 156 779	331 135 655	352 771 575	325 210 899
29.	Sulawesi Barat	192 023 417	283 519 836	412 313 051	486 191 484
30.	M a l u k u	342 780 472	374 365 554	413 984 128	497 607 231
31.	Maluku Utara	257 686 004	273 416 865	377 283 949	501 160 555
32.	P a p u a	1 390 393 235	2 190 858 190	1 937 565 080	1 989 733 000
33.	Papua Barat	240 867 150	426 803 911	1 057 922 986	1 581 743 000
JUMLAH/TOTAL		34 483 611 934	39 726 141 320	43 212 462 677	57 030 812 189

*) Data APBD

REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.B.1

SELURUH INDONESIA

TABLE

ACTUAL PERSONNEL DIRECT EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT

THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	68 234 346	194 831 287	167 960 961	296 562 526
2.	Sumatera Utara	40 214 134	125 151 341	145 590 665	173 967 839
3.	Sumatera Barat	26 375 304	76 255 217	55 511 523	67 368 083
4.	R i a u	143 766 806	389 133 573	401 647 794	333 186 678
5.	J a m b i	16 921 125	67 965 030	54 733 496	58 789 881
6.	Sumatera Selatan	29 493 132	132 193 602	154 123 673	502 895 093
7.	Bengkulu	16 976 517	53 737 939	53 699 610	46 292 300
8.	Lampung	48 909 055	109 074 104	77 346 004	79 785 684
9.	Bangka Belitung	3 999 323	41 500 824	59 478 732	43 078 222
10.	Kepulauan Riau	4 450 870	174 748 595	81 887 760	198 746 558
11.	DKI Jakarta	1 262 784 199	1 460 880 627	1 918 187 026	1 850 282 635
12.	Jawa Barat	340 366 071	261 363 145	269 672 718	384 125 697
13.	Jawa Tengah	179 316 526	262 242 181	250 055 680	242 916 811
14.	D I Yogyakarta	19 518 207	62 013 000	77 683 468	92 970 298
15.	Jawa Timur	378 004 661	358 504 881	21 201 965	447 872 240
16.	Banten	12 521 208	145 863 556	138 702 929	108 070 778
17.	B a l i	32 459 058	44 006 786	40 754 468	45 469 079
18.	Nusa Tenggara Barat	60 169 754	146 734 308	58 036 638	62 758 191
19.	Nusa Tenggara Timur	30 300 377	56 831 008	56 200 520	45 564 709
20.	Kalimantan Barat	15 577 765	71 151 108	61 463 897	74 977 923
21.	Kalimantan Tengah	14 606 083	45 415 721	52 027 335	62 899 732
22.	Kalimantan Selatan	22 336 543	209 712 555	95 360 699	73 941 903
23.	Kalimantan Timur	205 537 068	242 903 051	342 289 063	236 213 142
24.	Sulawesi Utara	30 727 453	60 006 967	73 784 960	49 617 565
25.	Sulawesi Tengah	24 732 846	58 675 797	48 331 512	59 307 275
26.	Sulawesi Selatan	37 519 665	102 663 738	101 518 645	122 926 700
27.	Sulawesi Tenggara	33 602 815	75 393 378	77 721 452	111 541 000
28.	Gorontalo	31 166 905	49 462 297	27 651 146	23 901 168
29.	Sulawesi Barat	16 494 189	46 103 176	56 256 109	55 865 851
30.	M a l u k u	13 850 482	43 608 792	52 043 712	83 124 345
31.	Maluku Utara	11 797 100	22 236 248	39 221 245	56 755 306
32.	P a p u a	84 160 014	190 004 280	206 297 330	311 382 000
33.	Papua Barat	10 744 409	47 076 549	55 797 078	70 199 000
JUMLAH/TOTAL		3 267 634 010	5 427 444 661	5 372 239 813	6 473 356 212

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.B.2 SELURUH INDONESIA
 TABLE ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
 THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	405 757 818	666 058 192	1 538 708 908	1 859 118 447
2.	Sumatera Utara	380 441 834	389 689 249	447 635 101	517 457 532
3.	Sumatera Barat	211 989 645	241 915 958	313 735 522	424 773 658
4.	R i a u	495 316 699	548 180 812	599 884 464	805 838 552
5.	J a m b i	229 481 162	288 147 111	278 270 196	390 304 235
6.	Sumatera Selatan	217 446 367	362 589 073	325 529 562	398 794 641
7.	Bengkulu	156 797 748	145 768 307	490 766 233	156 373 865
8.	Lampung	221 318 598	369 676 218	362 818 709	512 830 676
9.	Bangka Belitung	66 614 952	82 057 721	105 828 477	141 302 876
10.	Kepulauan Riau	364 212 832	337 184 160	399 783 218	340 085 093
11.	DKI Jakarta	3 305 610 261	4 023 191 536	5 255 670 595	7 602 103 580
12.	Jawa Barat	698 599 050	820 793 985	943 386 901	1 566 111 018
13.	Jawa Tengah	776 048 688	811 302 913	1 022 442 666	1 335 571 106
14.	D I Yogyakarta	124 035 643	223 723 942	268 023 479	388 547 579
15.	Jawa Timur	1 529 326 834	1 194 352 556	1 311 774 043	1 662 440 141
16.	Banten	445 114 854	323 137 863	356 095 626	462 842 148
17.	B a l i	187 619 351	246 162 309	276 840 973	315 731 109
18.	Nusa Tenggara Barat	199 653 404	172 965 319	217 322 931	209 609 910
19.	Nusa Tenggara Timur	178 113 895	223 496 043	239 658 532	282 838 037
20.	Kalimantan Barat	253 608 317	265 111 955	327 122 350	419 364 316
21.	Kalimantan Tengah	157 190 273	156 737 652	229 465 902	325 897 796
22.	Kalimantan Selatan	202 668 510	229 420 455	282 988 393	359 986 638
23.	Kalimantan Timur	380 079 752	413 693 592	554 858 140	801 670 216
24.	Sulawesi Utara	120 059 294	186 647 334	184 703 131	210 101 795
25.	Sulawesi Tengah	159 919 607	192 627 988	289 497 279	293 111 600
26.	Sulawesi Selatan	270 639 263	363 593 280	435 182 478	451 134 231
27.	Sulawesi Tenggara	135 476 597	182 174 767	222 612 223	263 434 000
28.	Gorontalo	79 378 521	118 824 649	168 193 654	201 759 691
29.	Sulawesi Barat	100 648 153	144 652 039	146 120 254	199 642 603
30.	M a l u k u	161 358 380	181 297 774	212 297 387	293 349 592
31.	Maluku Utara	133 223 904	154 217 386	158 556 450	172 141 936
32.	P a p u a	590 163 760	482 551 226	682 075 010	776 980 000
33.	Papua Barat	114 838 837	190 833 278	295 498 032	397 290 000
JUMLAH/TOTAL		13 052 752 803	14 732 776 642	18 943 346 819	24 538 538 617

*) Data APBD

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI

TABEL 5.B.3
TABLE

SELURUH INDONESIA
ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA
2006 - 2009
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	570 302 906	775 174 701	2 609 726 658	5 015 630 210
2.	Sumatera Utara	622 821 423	686 133 768	579 740 663	713 514 349
3.	Sumatera Barat	248 376 908	259 261 224	362 102 930	431 323 611
4.	R i a u	1 407 653 603	1 508 724 965	1 195 266 683	1 206 079 987
5.	J a m b i	416 798 690	422 441 973	560 254 716	483 926 718
6.	Sumatera Selatan	846 994 965	984 279 769	891 581 986	636 553 693
7.	Bengkulu	125 966 079	189 714 611	388 314 528	134 924 723
8.	Lampung	326 507 852	269 809 535	208 831 677	236 714 823
9.	Bangka Belitung	153 953 589	194 509 407	235 191 235	347 219 927
10.	Kepulauan Riau	193 651 206	434 986 063	289 202 689	636 866 382
11.	DKI Jakarta	5 432 050 727	5 190 895 327	2 581 600 192	5 944 870 993
12.	Jawa Barat	630 632 185	360 690 912	354 305 897	923 766 937
13.	Jawa Tengah	635 301 282	373 237 100	530 106 603	588 246 693
14.	D I Yogyakarta	94 747 519	104 220 867	191 833 726	206 074 762
15.	Jawa Timur	801 847 428	642 101 293	548 509 682	441 705 210
16.	Banten	465 048 365	444 887 565	593 948 138	659 806 842
17.	B a l i	229 474 954	144 279 992	122 098 439	156 991 439
18.	Nusa Tenggara Barat	150 098 831	154 135 367	173 739 486	141 750 194
19.	Nusa Tenggara Timur	129 646 517	293 850 288	202 721 742	168 155 164
20.	Kalimantan Barat	289 882 545	270 667 805	410 746 360	274 562 393
21.	Kalimantan Tengah	405 756 497	443 113 370	573 639 403	639 043 080
22.	Kalimantan Selatan	362 463 500	367 616 959	401 891 492	391 252 682
23.	Kalimantan Timur	1 525 245 756	2 049 413 770	1 654 359 696	1 730 495 580
24.	Sulawesi Utara	112 059 712	138 200 203	157 341 663	242 945 084
25.	Sulawesi Tengah	142 057 042	119 518 189	202 669 581	283 633 118
26.	Sulawesi Selatan	315 605 490	321 084 680	275 180 935	291 258 089
27.	Sulawesi Tenggara	188 197 147	213 737 997	150 135 883	352 350 000
28.	Gorontalo	153 611 353	162 848 709	156 926 775	99 550 040
29.	Sulawesi Barat	74 881 075	92 764 621	209 936 688	230 683 030
30.	M a l u k u	167 571 610	149 458 988	149 643 029	121 133 294
31.	Maluku Utara	112 665 000	96 963 231	179 506 254	272 263 313
32.	P a p u a	716 069 461	1 518 302 684	1 049 192 740	901 371 000
33.	Papua Barat	115 283 904	188 894 084	706 627 876	1 114 254 000
JUMLAH/TOTAL		18 163 225 121	19 565 920 017	18 896 876 045	26 018 917 360

*) Data APBD

REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.C
TABLE

ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT

THROUGHOUT INDONESIA

2006 - 2009

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2006	2007	2008	2009 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3 501 631 088	3 416 821 276	4 337 873 301	82 600 000
2.	Sumatera Utara	332 734 153	421 875 297	652 761 352	32 173 585
3.	Sumatera Barat	246 282 693	259 616 802	344 106 415	42 151 807
4.	R i a u	1 240 466 655	755 697 471	973 073 220	156 900 450
5.	J a m b i	327 576 882	360 487 860	390 886 774	8 924 000
6.	Sumatera Selatan	384 526 306	153 885 330	288 684 451	0
7.	Bengkulu	127 384 801	204 250 385	278 702 464	366 754 851
8.	Lampung	364 125 381	209 461 217	192 341 218	0
9.	Bangka Belitung	297 797 793	306 288 047	319 465 870	2 000 000
10.	Kepulauan Riau	480 386 469	187 263 280	391 953 213	4 000 000
11.	DKI Jakarta	2 283 041 101	1 838 772 505	4 629 488 116	311 066 085
12.	Jawa Barat	1 140 356 061	1 622 888 908	2 514 361 693	167 907
13.	Jawa Tengah	885 653 420	895 433 125	889 050 921	341 937 835
14.	D I Yogyakarta	219 915 582	539 576 751	342 384 028	16 375 000
15.	Jawa Timur	1 221 922 350	1 587 372 539	2 595 366 864	103 592 000
16.	Banten	128 695 962	198 769 649	246 501 923	13 500 000
17.	B a l i	191 882 600	287 078 462	485 619 400	23 900 000
18.	Nusa Tenggara Barat	85 370 042	75 836 549	94 843 371	66 610 000
19.	Nusa Tenggara Timur	361 515 892	313 975 090	272 170 957	50 000 000
20.	Kalimantan Barat	157 188 493	190 839 755	247 569 386	20 300 000
21.	Kalimantan Tengah	142 754 456	207 853 028	176 028 684	19 803 200
22.	Kalimantan Selatan	244 761 974	308 436 987	599 769 551	77 798 000
23.	Kalimantan Timur	3 078 316 467	2 889 832 431	2 132 356 631	332 000 000
24.	Sulawesi Utara	69 859 113	68 042 372	437 153 668	250 100 000
25.	Sulawesi Tengah	76 797 121	116 515 559	195 751 546	22 883 612
26.	Sulawesi Selatan	277 962 216	241 982 727	207 773 765	3 261 400
27.	Sulawesi Tenggara	73 496 318	13 000 000	120 210 611	12 300 000
28.	Gorontalo	70 675 056	136 291 515	128 134 197	154 134 197
29.	Sulawesi Barat	74 018 347	49 221 605	60 818 581	1 000 000
30.	M a l u k u	49 924 830	317 843 166	68 106 192	6 265 000
31.	Maluku Utara	22 159 759	33 844 962	57 268 676	15 500 000
32.	P a p u a	977 038 240	879 663 012	6 411 009	180 000 000
33.	Papua Barat	134 951 394	193 509 013	49 284 435	25 205 000
JUMLAH/TOTAL		19 271 169 015	19 282 226 675	24 726 272 483	2 743 203 929

*) Data APBD